

**KEPALA DESA SEBAGAI MOTIVATOR PEMBANGUNAN
DI DESA LIBURENG KECAMATAN TONRA
KABUPATEN DATI II BONE**



OLEH

RUSDI ALAM

45 86 020 170

*Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Menempuh Ujian Sarjana Negara
Jurusan Ilmu Administrasi Negara*

pada

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
universitas "45" ujung pandang
1 9 9 5**

HALAMAN PENGESAHAN

Pada hari ini tanggal bulan 1995
Skripsi dengan ini judul : KEPALA DESA SEBAGAI MOTIVATOR
PEMBANGUNAN DI DESA LIBURENG , KECAMATAN TONRA, KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II BONE

Nama : Rusdi Alam

Nomor Stb/ Nirm : 4586020170 / 871133209

Jurusan : Administrasi Negara

Disetujui untuk diujikan pada tanggal 1995

Menyetujui

Pembimbing I



(Drs.H. Misbahuddin Achmad, MS)

Pembimbing II



(Drs. Suparman Mekkah)

Mengetahui

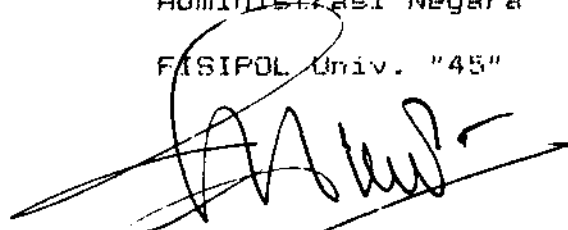


(Drs. Guntur Karnaeni)

Ketua Jurusan

Administrasi Negara

FISIPOL Univ. "45"



(Drs.H. Muhammad Thala)

MALAMAN PENERIMAAN

Pada hari selasa, tanggal 31 Januari 1995 Skripsi dengan

Judul :

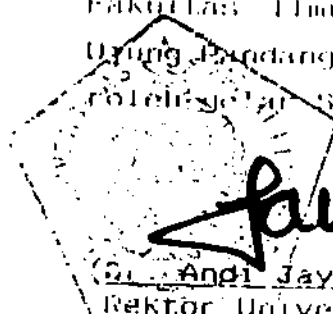
Kepala Desa Sebagai Motivator Pembangunan di Desa

Libureng Kecamatan Teora Kabupaten Daerah Tingkat II

Bono.

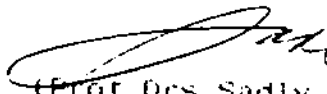
Nama : **RUSDI ALAN**
No. S.I.B./Nim : **45 86 020 170**
Jurusan : **Ilmu Administrasi**

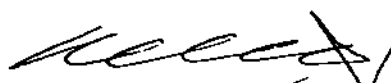
Telah diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Sarjana Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "AS" Ujung Pandang untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara



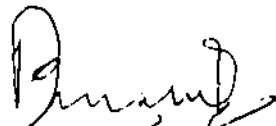

(**Andi Jaya Sose, SE, MBA**)
Rektor Universitas "AS"

PENGAWAL UJIAN


(**Prof. Drs. Sady AD, MPA**)
Dekan F.I.S.I.P. Ujung Pandang

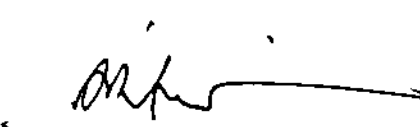
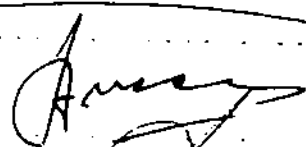

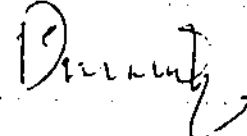

(**Drs. Guntur Karnadi**)
Ketua

PANGKALAN UJIAN


(**Drs. Suparman Bekkah**)
Sekretaris

LEH PERUBIH

1. Prof. Dr. H. Anwar Achmad
2. Drs. A. Gau Kadir, MA
3. Drs. H. Misbahuddin Achmad, MA
4. Drs. Suparman Bekkah

KATA PENGANTAR

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan taufiq-nya sehingga penulis berkesempatan untuk menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.

Dalam rangka penyusunan skripsi ini, penulis telah berupaya dengan segala kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki agar dapat menyelesaikan dengan baik, namun penulis menyadari akan kekurangan dan ketidaksiempurnaan, dalam penulisan, dari itulah secara terbuka penulis bersedia menerima saran dan kritik sebagai bahan pertimbangan untuk penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Selain itu, dalam penyelesaian Skripsi ini dapat terlaksana dengan baik atas bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, utamanya kedua Pembimbing yang telah memusatkan perhatiannya untuk meruntun penulis. Sehingga dengan demikian wajarlah penulis dengan ikhlas mengucapkan terima kasih dan perhatian kepada Bapak Drs. Misbahuddin Achmad,MS dan Drs. Suparman Mekka sebagai pembimbing I dan II penulis.

Secara khusus penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada;

1. Bapak DR. A. Jaya Sose, SE, MBA sebagai Rektor Universitas "45" Ujung Pandang.
2. Bapak Drs. Guntur Karnaeni Dekan Fakultas Isipol Universitas "45" Ujung Pandang.
3. Drs. H. Muhammad Thala sebagai Ketua Jurusan Isipol dan Sekretaris Jurusan Isipol Universitas "45" Ujung Pandang.
4. Bapak/Ibu dosen dan Staf Tata Usaha, yang dengan tabah dan Ikhlas dalam mendidik, memberikan Ilmu Pengetahuan serta selalu siap membantu penulis selama menjalani perkuliahan sampai sekarang ini pada Fakultas Isipol Universitas "45" Ujung Pandang.
5. Bapak Drs. A. Syafruddin selaku Kepala Wilayah Kecamatan Tonra dan Bapak Bachtiar sebagai Sekdam Kecamatan Tonra yang telah membantu penulis memberikan izin untuk melakukan penelitian.
6. Bapak . Sudarno, BA selaku Kepala Desa Leburing beserta aparatnya, yang secara sukarela meluangkan waktunya memberi informasi selama dalam penelitian.
7. Kepada seluruh masyarakat Desa Leburing, utamanya yang menjadi respnden penulis, yang telah bersusah paya memberikan informasi dalam pengumpulan data.

8. Semua rekan-rekan mahasiswa Pada Fakultas Isipol khususnya dalam jurusan Administrasi Negara yang penulis takdapat menyebutkan satu persatu.
9. Lebih khusus lagi kepada Kak Drs. Syamsul Alam Azis dan Istri tercinta Hernawati telah bersusah paya mendorong dan mengusahakan penulis selama perkuliahan sampai sekarang ini.
10. Ter istimewa kepada Kedua Orang tua, yang betapa besar jasanya-jasanya serta pengorbanannya dalam membantu dan meringankan beban yang dialami penulis selama bergelut di dunia pendidikan, baik moril maupun materil, olehnya itu hanya sembah sujud ananda mohon maaf kepada Ilahi Rabbi, agar memperoleh Ridho Allah Subhana Wataalan . Amin.

Dengan kerendahan hati, penulis persembahkan skripsi ini kepada Almamater tercinta, Fakultas Isipol Universitas "45". Akhirnya semoga untaian lembaran ini bukanlah merupakan suatu akhir dalam perjalanan dan jeripayah selama ini, bukanlah kepuasan dihari esok, kedua hari ini adalah hari esok.

Sekian dan terima kasih.

Wassalam

Ujung Pandang,

1994

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENERIMAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Metode Penelitian.....	7
E. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian.....	11
B. Pembangunan Desa.....	17
C. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kepala Desa.....	21
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Singkat Desa Libureng.....	30
B. Geografis.....	33
C. Demografis.....	35

	E. Pembangunan Desa Lihurang.....	49
BAB IV	HASIL PENGUMPULAN DATA DAN PEMBAHASAN	
	A. Peranan Kepala Desa Sebagai Motivator Pembangunan.....	59
	B. Partisipasi Masyarakat.....	72
	C. Faktor-Faktor Berpengaruh.....	75
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	81
	B. Saran.....	82
	DAFTAR PUSTAKA.....	90
	LAMPIRAN.....	

DAFTAR TABEL

Nomor	Teks	Halaman
1.	Luas Penggunaan tanah di Desa Libureng.....	35
2.	Komposisi penduduk Desa Libureng Menurut kelompok umur	38
3.	Jumlah penduduk Desa Libureng menurut mata pencaharian	40
4.	Jumlah penduduk menurut Agama	41
5.	Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan Desa Libureng	42
6.	Luas areal produksi tanaman pangan Desa Libureng	50
7.	Jenis dan jumlah ternak di Desa Libureng ..	51
8.	Jenis dan jumlah prasarana dalam bidang perdagangan	52
9.	Prasarana pertambangan di Desa Libureng	53
10.	Sarana transportasi di Desa Libureng	54
11.	Jenis dan jumlah prasarana kesehatan di Desa Libureng	55
12.	Peranan Pendidikan di Desa Libureng.....	56
13.	Jenis dan Jumlah Prasarana di Desa Libureng	57
14.	Sarana Komunikasi di Desa Libureng.....	58
15.	Tanggapan Responden Penilaian Terhadap Kepala Desa Mengerakkan Minal, Fomasiun dan Semangat Masyarakat Untuk Berpartisipasi Dalam Pembangunan.....	60
16.	Tanggapan Res-ponden Penilaian Terhadap Kepala Desa Atas Tindakan dan Pengambilan Keputusan Bagi Masyarakat Dalam Pembangunan.....	61

17.	Tanggapan Responden Terhadap Penilaian Kepala Desa Sebagai Pendukung Masyarakat Untuk Pembangunan.....	62
18.	Tanggapan Responden Penilaian Terhadap Kepala Desa Dalam Memberikan Setujuk Kepada Perorangan, Keluarga dan Kelompok.....	63
19.	Tanggapan Responden Penilaian Terhadap Kepala Desa Dalam.....	64
20.	Tanggapan Responden Penilaian Terhadap Kepala Desa Mengutamakan Masyarakat Dalam Pembangunan.....	65
21.	Tanggapan Responden Penilaian Terhadap Kepala Desa Mendukung/Mempertkarsai Pelaksanaan Pembangunan.....	65
22.	Tanggapan Responden Penilaian Terhadap Kepala Desa Dalam Memberikan Kemampuan Masyarakat Untuk Berpartisipasi Dalam Pembangunan.....	66
23.	Tanggapan Responden Penilaian Terhadap Kepala Desa Dalam Menjadikan Koordinasi Dalam Pembangunan.....	67
24.	Tanggapan Responden Penilaian Terhadap Kepala Desa Kemampuannya Mempengaruhi Masyarakat Untuk Berpartisipasi Dalam Pembangunan.....	68
25.	Tanggapan Responden terhadap kesempatan diberikan untuk berpartisipasi dalam pembangunan	72
25.	Tanggapan Responden Terhadap Faktor Pendukung Dalam Pelaksanaan Peranan Kepala Desa Sebagai Motivator Pembangunan.....	73
26.	Tanggapan Responden Terhadap Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Peran Kepala Desa Sebagai Motivator Pembangunan.....	76

BAB I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia adalah mayoritas bertempat tinggal di pedesaan. Masyarakat yang bermukim di daerah pedesaan, adalah merupakan salah satu faktor modal dasar bagi pembangunan nasional. Dengan jumlah warga masyarakat yang ada dipedesaan sangat besar itu, dapat dibina dengan baik sehingga nantinya merupakan sumber modal yang efektif untuk berbagai sektor kegiatan pembangunan disegala bidang kehidupan masyarakat. Olehnya itu, sangat perlu difokuskan perhatian pada peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat demi terselenggarannya pencapaian dan tujuan pembangunan secara nasional. Sehubungan dengan hal itu, dalam GBHN (TAP MPR NO IV/ MPR/ 1978) Mengenai pola dasar pembangunan nasional tercantum mengenai arah dan tujuan pembangunan yaitu:

"Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spritual berdasarkan Pancasila didalam wadah Negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana prike-manusiaan bangsa yang aman, tentram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersatu, tertib dan damai".

Berdasarkan atas tujuan pembangunan sebagaimana tercantum dalam penjelasan diatas, maka yang menjadi sasaran pembangunan nasional pada hakekatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan -

seluruh masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat pedesaan pada umumnya. Pembangunan tidak hanya menyangkut salah satu aspek kehidupan saja, akan tetapi menyangkut segala aspek dan akan menjangkau seluruh masyarakat Indonesia dimana saja berada. Pembangunan yang sedang digalakkan oleh pemerintah dewasa ini, pada hakeketnya merupakan suatu proses pembaharuan disegala bidang, yang sedikit banyaknya akan membawa pengaruh terhadap kebudayaan yang didukung oleh masyarakat pedesaan tertentu, untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur.

Dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur sangat diperlukan suatu upaya pemerataan pembangunan di seluruh daerah, termasuk daerah pedesaan. Dari situlah pemerintah pusat memberi kesempatan yang seluas-luasnya pada masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan guna memilih pemimpin sebagai panutan mereka yang dapat berpengaruh serta mampu menjalankan Administrasi pemerintahan dipedesaan.

Demikian halnya yang terjadi di desa Libureng, Kecamatan Tonra Kabupaten Daerah Tingkat II Bone yang mana dalam melaksanakan pembangunan disegala sektor pedesaan, Kepala Desa cukup memberi pengaruh dan dianggap mampu menggerakkan masyarakatnya dalam ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Kepala Desa merupakan perangkat

pemerintah yang memimpin suatu wilayah tertentu dalam melaksanakan pembangunan oleh karena itu pejabat Kepala Desa itu dituntut harus mempunyai kelebihan tertentu terutama mampu memobilisir dan memotivasi masyarakat, mempunyai jiwa kepemimpinan, berwibawa dan serta sangat berpengaruh ditengah-tengah masyarakat, bertanggung jawab dan mampu menjaga kestabilan umum seperti tergambar jelas dalam Undang-undang No 5 Tahun 1979 tentang pokok-pokok Pemerintahan Desa yang berbunyi sebagai berikut :

"Kepala Desa menjalankan hak, wewenang, dan kewajiban pimpinan pemerintah Desa yaitu menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan merupakan penyelenggara dan bertanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah Desa, urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menumbuhkan serta mengembangkan jiwa gotong royong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan Pemerintahan Desa".

Dari penjelasan diatas dalam perwujudan pembangunan dipedesaan sangat ditentukan atas dukungan pemimpin dalam hal ini Kepala Desa selaku motivator pembangunan di pedesaan.

Karena mengingat pentingnya tuntutan pembangunan ini, penulis mencoba mempermasalahkan sejauhmana peranan Kepala Desa sebagai motivator pembangunan inilah yang mendorong penulis untuk mengadakan penelitian dan sekali gus ingin mengemukakan dalam suatu tulisan Ilmiah yang berjudul "Kepala Desa Sebagai Motivator Pembangunan Di

Desa Libureng Kecamatan Tonro, Kabupaten Bone" dengan berdasarkan atas beberapa alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pembangunan desa adalah merupakan bagian dari pembangunan Nasional sehingga pemerintah selalu meningkatkan perhatiannya ke desa, sebab tidak sedikit kebutuhan hidup masyarakat Indonesia tergantung pada daerah pedesaan. Dari itulah maka upaya-upaya pemerintah terhadap pembangunan pedesaan seharusnya berdasarkan dengan tuntutan dan kepentingan penduduk pedesaan, agar pada tahap selanjutnya dapat merupakan aspek-aspek positif yang dapat dikembangkan serta dipertanggung jawabkan terhadap pembangunan nantinya.
2. Kedudukan Kepala Desa sebagai Administrator pembangunan Pemerintahan dan kemasyarakatan maka dengan demikian mempunyai sifat tanggung jawab yang besar terhadap kemampuannya dalam mengatur dan mengurus rumah tangga desanya atas kekuatan sendiri atas dukungan (partisipasi) terhadap masyarakat untuk berpartisipasi dalam setiap sektor pembangunan pedesaan.

B. Batasan dan Rumusan Masalah.

Pembangunan yang telah digalakkan oleh Pemerintah pada hakekatnya segala aspek kehidupan masyarakat dan

bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat hanya dapat dicapai jika upaya pembangunan mendapat dukungan partisipasi masyarakat (terciptanya keseimbangan kewajiban yang serasi antara kegiatan pemerintah dan masyarakat). Partisipasi masyarakat menyangkut persoalan sikap dan perlakuan manusia baik sebagai subyek maupun sebagai obyek pembangunan. Hal ini dilaksanakan adalah sebagai upaya mendukung lancarnya pelaksanaan pembangunan nasional dan khususnya pembangunan pedesaan yang telah dicanangkan oleh pemerintah, melalui kebijaksanaan-kebijaksanaan lebih efektif atau berdasarkan dari kebutuhan masyarakat.

Selain itu walaupun pemerintah telah memberi bentuk-bentuk kebijaksanaan yang telah terlaksana untuk tujuan positif terhadap seluruh masyarakat Indonesia utamanya masyarakat pedesaan, akan tetapi masih sering terdapat ketidak sesuaian dalam penerapannya. Ini berakibat adanya kerenggangan antara pemerintah dan masyarakat.

Masalah ini biasanya muncul karena kurangnya dorongan dari pihak yang terkait, dan lain itu mungkin dikarenakan masyarakat sebagai sasaran pembangunan belum menyadari sepenuhnya akan tanggung jawab dan kewajiban sebagai warga masyarakat untuk ikut berperan dalam pembangunan.

Berdasarkan dengan permasalahan tersebut diatas maka penulis berpatokan dalam beberapa pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kepemimpinan Kepala Desa dalam melaksanakan fungsinya selaku motivator pembangunan dalam wilayahnya ?
2. Bagaimana tingkat ketertiban dan partisipasi masyarakat dalam berbagai sektor pembangunan pedesaan ?
3. Faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi kepala desa selaku motivator pembangunan pedesaan ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana kepemimpinan kepala desa dalam melaksanakan fungsinya selaku motivator pembangunan dalam wilayahnya ?
- b. Untuk mengetahui bagaimana tingkat ketertiban dan partisipasi masyarakat dalam berbagai sektor pembangunan di pedesaan ?
- c. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi kepala desa selaku motivator pembangunan di pedesaan ?

2. Kegunaan Penelitian

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi input bagi pemerintah dan utamanya kepada desa, sebagai dasar dalam perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan di desa.
- b. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat dalam meningkatkan pengetahuannya tentang seluk beluk pemerintahan desa.

D. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Dalam melakukan penelitian, penulis memakai tipe penelitian Deskriptif menggambarkan keadaan obyek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

2. Dasar Penelitian

Dasar penelitian ini ialah Survey, mengamati secara langsung obyek atau lokasi penelitian sehingga dapat memperoleh data-data secara nyata.

3. Lokasi

Tempat penelitian adalah Desa Liliareng, Kecamatan Tonro Kabupaten Tingkat II Bone yang meliputi 2 (dua) dusun, yaitu Dusun Campaniga, Dusun Santileng.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

populasi penelitian adalah seluruh masyarakat Desa Labarend yang berjumlah 832 orang.

b. Sampel

Sampel yang digunakan ialah acak-probabilitas (Randomized Sampling) dari sejumlah 147 responden yang terpilih sebagai berikut :

1. Kepala/Sekretaris Desa	=	2 Orang
2. Pengawas UKM	=	15 Orang
3. Kepala Dusun	=	2 Orang
4. Tokoh Agama	=	5 Orang
5. Pendidik	=	5 Orang
6. Karang Taruna	=	45 Orang
7. Masyarakat biasa	=	63 Orang
Jumlah		147 Orang

5. Teknik Pengumpulan data

Dalam pengumpulan data pada dasarnya terdapat

kan suatu kegiatan operasional terhadap penelitian. Dari itu penulis dalam melakukan penelitian berdasarkan pada metode atau cara yaitu :

- a. Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan jalan mengamati langsung obyek yang akan diteliti utamanya kepada seluruh responden yang dipilih.
- b. Wawancara atau metode pengajuan pertanyaan langsung dimana penulis melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan menggunakan pertanyaan pada responden.
- c. Kuesioner (pengedaran angket), yaitu mengedarkan suatu daftar pertanyaan tertulis kepada responden.

E. Sistematika Pembahasan

Materi Skripsi ini selengkapnya tersusun dalam lima bab yaitu sebagai berikut :

Bab Pertama yang merupakan bab pendahuluan yang berisi Latar Belakang Masalah, Batasan dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua yaitu Tinjauan Pustaka yang memuat, Pengertian Pembangunan Desa, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kepala Desa.

Desa.

Bab Ketiga adalah Gambaran Umum/ Lokasi penelitian yang isinya mengenai Sejarah Singkat Desa Libureng, Geografis, Demografis Struktur Pemerintahan Desa Libureng, Pembangunan Desa Libureng.

Bab Keempat Hasil Pengumpulan Data dan Pembahasan yang memuat Fungsi Kepala Desa Sebagai Motivator Pembangunan, Partisipasi masyarakat faktor-faktor berpengaruh.

Bab Kelima merupakan bab Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran-saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian.

Untuk memberikan penjelasan tentang judul Skripsi ini, penulis akan merangkai pengertian dari tiap-tiap komponen yang dianggap penting dalam penentuan judul tersebut. Komponen-komponen itu antara lain :

1. Kepala Desa

Istilah Kepala Desa sampai sekarang ini belum mempunyai definisi, sehingga penulis mencoba mengemukakan beberapa pengertian tentang Kepala Desa.

Kepala Desa bila dilihat dari konsep tradisional, adalah merupakan pemuka adat dan pemuka agama. Sejalan dengan pengertian itu, Rusli Muhammad (Soejono Soekanto, 1986:40) mengatakan bahwa "Pengusa adat adalah mereka yang mempunyai kewibawaan dan berkuasa memberi keputusan dalam masyarakat adat itu". Sedangkan menurut Soerjo Handjosoengrat dan R Hindrabau (1968:17) istilah dari segi kedudukannya, sebagai alat pemerintah, alat pemerintah daerah dan alat pemerintah desa yang meliputi penyelenggaraan pemerintah desa.

Selain itu, oleh Dra. Ny. Sumba Saparin mengemukakan pengertian Kepala desa sebagai berikut :

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian.

Untuk memberikan penjelasan tentang judul Skripsi ini, penulis akan meninjau pengertian dari tiap-tiap komponen yang dianggap penting dalam penentuan judul tersebut. Komponen-komponen itu antara lain :

1. Kepala Desa

Isilah Kepala Desa sampai sekarang ini belum mempunyai definisi, sehingga penulis mencoba mengemukakan beberapa pengertian tentang Kepala Desa.

Kepala Desa bila dilihat dari konsep tradisional, adalah merupakan pemuka adat dan pemuka agama. Sejalan dengan pengertian itu, Ruslan Muhammad (Soejono Soekanto, 1986:40) mengatakan bahwa "Penguasa adat adalah mereka yang mempunyai kehormatan dan kekuasaan memberi keputusan dalam masyarakat adat itu". Sedangkan menurut Soerjo Handjaryaningrat dan R Hindratna (1963:77) melihat dari segi kedudukannya, sebagai alat pemerintah, alat pemerintah daerah dan alat pemerintah desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.

Selain itu, oleh Drs. Ny. Sumba Saparin mengemukakan pengertian Kepala desa sebagai berikut :

"Pemimpin yang berwenang untuk menjalankan pemerintahan desa disebut Kepala Desa atau istilah adat dengan sebutan Lurah, Luwa, bekel, petinggi (Jawa Tengah) Mandor, Lembar, kokolot (Jawa Barat) Kejuran, Pengulu Suku, Ke ucik, Petua (Gaya alas, Aceh) pengulu andiku (Sumatra Barat) Orang, Kepala Desa (Hitu, Ambon) Raja Panusunan (Sekitar Danau Toha) Kaisar Pengulu (Karo Batak) Perak, Klein (Bali) Morspalab (Gorontalo) Kaneloho (Bolaang Mangendow)" (1972:39)

Dari uraian yang dikemukakan oleh Sarjana itu, maka pengertian dalam istilah yang terkandung dalam definisi tersebut merupakan suatu yang bersumber pada hukum adat masing-masing daerah sejak zaman terdahulu sampai sekarang. Namun yang paling penting bahwa kedudukan kepala Desa suatu daerah mempunyai kesamaan.

Menurut Theodore M. Smith (Tim IRD, 1973/1974:219) menyatakan bahwa: "Jawa Tengah, Maluku, dan Sulawesi Selatan Kepala Desa merupakan raja kecil". Jadi dengan demikian seorang kepala Desa sebagai orang tua yang nasihat-nasihatnya patut dijadikan pegangan, sebagai seorang pemimpin upacara-upacara adat dan lain-lain sebagainya atau dengan kata lain, segala sesuatunya disentralisasikan pada diri kepala Desa tersebut.

Berdasarkan kutipan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Kepala Desa sejak dahulu ditarik kesimpulan bahwa kepala Desa sejak dahulu sampai sekarang sudah ada dan merupakan penguasa tunggal di wilayahnya (Raja kecil).

Jadi Kepala Desa merupakan kepala wilayah Administrator yang terendah dan berhak mengatur dan mengurus

rumah tangganya sendiri menurut ketentuan yang berlaku baik adat maupun keputusan pemerintah.

2. Motivator Pembangunan

Motivator:

Kepala Desa sebagai Administrator pembangunan, juga berperan sebagai Motivator pembangunan. Pengertian sebagai motivator di jelaskan oleh John F. Mee dalam bukunya Management Thought in a Dynamic economy (Coewarno Handayaniingrat, merumuskan sebagai berikut:

"Pemberian motivasi (Motivatoring) adalah seluruh proses pemberian motivasi (dorongan) kepada karyawan untuk bekerja lebih bergairah, sehingga mereka dengan sadar mau bekerja demi tercapainya tujuan organisasi secara berhasil dan berdaya guna". (1983:26)

Sedangkan menurut DR. Siagian M.P.A. memberikan definisi motivator sebagai berikut:

"Pengerakan atau (motivating) keseluruhan proses pemberian motif bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa sehingga mereka mau bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis ". (1983 : 128)

Selain itu oleh Barelson dan Stener (Siagian) :
memberi pengertian sebagai berikut:

"Motif ialah suatu pernyataan bathin yang berwujud dengan kekuatan untuk bertindak atau bergerak dan bahwa secara langsung atau melalui tingkah priilaku mengarah terhadap sasaran (an inner state that energises, activites or moves." Motiva ons " and that directs or channels behavilor to ward goals) dengan perkataan lain "motivasi" adalah pengertian umum dalam bentuk dorongan "kehendak " "keinginan" dan daya kekuatan dan yang kesamaannya".(1983:128)

Selanjutnya oleh Siagian M.P.A memberikan pengertian motivasi sebagai berikut :

"Daya penolong yang mengakibatkan seseorang anggota organisasi mau dan rela untuk menggerakkan kemam-

puannya dalam bentuk keahlian atau keterampilan, tenaga dan waktunya untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya" (1989 hal 67)

Dari ke empat batasan pengertian diatas, memberikan gambaran bahwa kegiatan motivasi sebagai proses memberi dorongan dan menstimulus individu, sehingga dengan demikian berkemauan untuk bertindak atau berbuat kepada tujuant tertentu.

Jika dasar pengertian di atas dihubungkan dengan Kepala Desa sebagai motivator, maka pemimpin pemerintahan Desa dan pemeraksa atau pemberi dorongan terhadap masyarakat ikut berpartisipasi dalam setiap langkah program pembangunan khususnya di pedesaan dalam rangka pencapaian tujuan pemerintah. Dalam menggerakkan masyarakat dalam untuk ikut berpartisipasi terhadap berbagai sektor pembangunan pedesaan bukan hal yang sulit karena di dasari oleh sifat manusia yang ingin terus tumbuh dan berkembang, ingin diberikan tugas dan pekerjaan yang menarik. Sejalan dengan itu oleh Douglas, MC Gregor (SP. Siagian : 1982 :69) bahwa "pada hakikatnya manusia adalah rajin, ingin tumbuh dan berkembang. Berkaitan dengan itu ditegaskan oleh Maslow dalam teori motivasinya, dikatakan bahwa di dalam diri manusia terdapat ciri msaum, yakni potensi kreatif atau ciri yang inheren dan mendorong manusia untuk tumbuh dan berkembang.

Berdasarkan kedua teori diatas, dapat diuraikan bahwa setiap orang ingin agar daya kreatifitasnya didorong untuk berkembang, pengetahuan dan keterampilannya dari kesempatan untuk terus meningkat.

Dengan faktor motivasi perilaku menjadi pendorong tercapainya sesuatu .

Istilah motivator mengarah kepada pengertian segala sesuatu yang mempengaruhi orang lain untuk bergerak melakukan suatu usaha. Motivator adalah pribadi dengan kapasitas kepemimpinannya mampu menggerakkan orang lain, dalam hal ini Kepala Desa sebagai motivator terhadap masyarakat merupakan ujung tombak pendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam Pembangunan Pedesaan.

Dari ketiga batasan pengertian diatas, memberikan gambaran bahwa kegiatan motivasi sebagai proses memberi dorongan, menstimulus individu sehingga dengan demikian berkemauan untuk bertindak atau berbuat kepada tujuan tertentu.

Istilah "motivator" mengarah kepada pengertian, "segala sesuatu yang mempengaruhi orang lain untuk bergerak melakukan sesuatu usaha. "Motivator" adalah pribadi dengan kapasitas kepemimpinannya mampu menggerakkan orang lain .

Pembangunan :

Bila pembangunan yang dimaksudkan itu bermakna suatu perkembangan dengan tujuan suatu perubahan. Sehubungan dengan yang dimaksudkan, Siagian mengemukakan sebagai

berikut:

"Pembangunan didefinisikan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan negara". (1983 : 2)

Sedangkan yang lain berkeinginan agar kondisi masyarakat lama tetap dipertahankan dan bermaksud membangun kembali (rekonstruksi) pola-pola lama atau perubahan. Sejalan dengan itu Bintaro (1974:22) memberi definisi pembangunan yaitu : "Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang kondisinya dan terus menerus dari suatu keadaan tertentu kepada suatu keadaan yang dianggap 'lebih baik". Berdasarkan dengan kedua pengertian tentang pembangunan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa setiap pembangunan dalam arti luas mengandung proses pertumbuhan dan perubahan serta pembaharuan yang berencana serta peralihan berkesinambungan.

3. Desa

Istilah desa pada mulanya hanya dikenal di pulau Jawa, Madura dan Bali. Sedangkan di pulau lain wilayah nusantara ini ada istilah lain untuk pengertian yang sama di Sulawesi Selatan, daerah yang setingkat desa di Jawa biasa disebut "Wanua" yang merupakan suatu lingkungan kehidupan masyarakat dan dipimpin oleh seorang kepala suku atau istilah lain dalam bahasa bugis "Sullewatang" atau pemimpin.

Mengenai pengertian atau definisi desa, Bintaro mengemukakan bahwa :

"Desa adalah perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis sosial, ekonomis, politis dan kultural yang terdapat disitu dalam hubungannya dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain". (1968 : 95)

Sedangkan menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa pada pasal 1 ayat a, menyatakan bahwa :

"Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia".

Berdasarkan dengan pengertian desa diatas, secara umum dapat dikemukakan unsur-unsurnya sebagai berikut :

- a. Adanya kehidupan bersama;
- b. adanya suatu kesatuan hukum;
- c. adanya kegiatan yang sama, lapangan kerja dan sifat gotong royong dan;
- d. adanya rasa kekeluargaan yang menonjol.

B. Pembangunan Desa

Dalam melaksanakan program pembangunan desa sangat berkaitan dengan upaya-upaya mendinamiskan masyarakatnya. Selain itu dalam rangka pembangunan pedesaan, pembangunan tersebut harus dilaksanakan dengan cara pengimbangan kewajiban yang serasi antara pemerintah dengan masyarakat desa. Pemerintah memberikan pembinaan, bimbingan,

pengarahan, pengawasan dan bantuan teknis, serta bantuan lainnya untuk meningkatkan swadaya gotong-royong masyarakat agar nantinya dapat berkembang dengan sendirinya berdasarkan dengan tingkat perkembangan desa dari Desa Swadaya dan menuju kepada Desa Swasembada.

Selain itu pemerintah memberikan bantuan bagi para petani, pedagang kecil, nelayan dan pengusaha golongan ekonomi lemah yang ada di pedesaan-pedesaan, yaitu disediakannya bantuan kredit desa.

Selanjutnya, sesuai dengan pelaksanaan Pembangunan Lima Tahun pemerintah mencanangkan langkah-langkah sebagai berikut :

- (a) Berusaha menyediakan dan memperluas lapangan kerja di daerah pedesaan baik dalam sektor pertanian, industri kecil, dan kerajinan rakyat pedesaan;
- (b) Menyelenggarakan pemukiman baru di daerah-daerah pedesaan yang masih memungkinkan atau transmigrasi lokal.
- (c) Melaksanakan pembangunan di daerah-daerah pedesaan yang masih memungkinkan atau transmigrasi lokal;
- (d) Memperluas dan menyempurnakan jaringan prasarana desa;
- (e) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat;
- (f) Meningkatkan usaha penerangan ke daerah pedesaan melalui bermacam-macam mas media, mengenai hal-hal yang berhubungan secara langsung dengan kegiatan-kegiatan produksi pedesaan dan kesejahteraan sosial;
- (g) Memperluas fasilitas masyarakat pedesaan terutama pembangunan fasilitas sanitasi lainnya;
- (h) Mengembangkan dan meningkatkan efektivitas Koperasi Unit Desa atau Badan Usaha Unit Desa, sebagai wadah kegiatan di bidang pembangunan ekonomi, pedesaan;

- (i) Mengembangkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dengan mengefektifkan Lembaga Sosial Desa, sebagai wadah kegiatan di bidang pembangunan sosial dalam arti yang luas di pedesaan-pedesaan.
- (g) Meningkatkan dan menyempurnakan aparatur pemerintah desa, baik struktural, operasional maupun kualitasnya sehingga mampu melaksanakan fungsinya.

Dalam Hal Pengadaan Penelitian :

- (a) Mengadakan penelitian yang saksama mengenai potensi pedesaan sebagai unit perkembangan regional, penerapan teknologi sederhana dan masalah pedesaan lainnya termasuk penelitian tata guna tanah (Land Use) serta penelitian dan pengembangan hukum pertanahan;
- (b) Melaksanakan pemukiman baru (Resettlement) pedesaan/ transmigrasi lokal di tempat yang lebih cocok untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan penduduk yang hidup terpencar-pencar di daerah terpencil dan berpindah-pindah serta memberikan kepastian hukum atas tanahnya (hak pemilikan tanah dan pendaftarannya).

Dalam hal meningkatkan swadaya gotong royong serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan melakukan kegiatan :

- (a) Meningkatkan kemampuan dan pendidikan/keterampilan anggota masyarakat pedesaan melalui kursus, siaran pedesaan, taman bacaan, dan perpustakaan desa dan lain-lain;
- (b) Memperbaiki administrasi dan meningkatkan aparatur pemerintahan desa;
- (c) Meningkatkan pembinaan dan efektifitas Lembaga Masyarakat Desa di dalam wadah Lembaga Sosial Desa dan membantu pertumbuhan dan perkembangan Badan Usaha Unit Desa/Koperasi Unit Desa;
- (d) Meningkatkan dan mengembangkan pembinaan kesejahteraan keluarga dan kegiatan generasi muda di pedesaan;
- (e) Membina dan meningkatkan efektifitas usaha-usaha ekonomi pedesaan golongan ekonomi lemah, antara lain dengan jalan melaksanakan program-program pelaksanaan landreform dan bantuan kredit pedesaan.

Mengembangkan Unit Daerah Kerja, yaitu sebagai suatu sistem pengembangan beberapa desa dalam kecamatan dengan pendekatan menyeluruh di bidang perencanaan, penelitian, penyusunan tata desa / dan koordinasi pelaksanaan rencana itu.

Sedangkan dalam hal meningkatkan tanggung jawab dan kemampuan yaitu melaksanakan pembangunan daerah pedesaan yang terarah untuk meningkatkan rasa kesadaran, rasa tanggung jawab dan kemampuan melalui perubahan sikap mental masyarakat desa dalam pembangunan. Dalam pelaksanaan tersebut bertumpuh pada dua cara yaitu :

- (a) Meningkatkan dan mengembangkan dinamika masyarakat, dengan memupuk rasa kesadaran dan tanggung jawab;
- (b) Mendorong guna potensi pedesaan seperti potensi manusia dan sosial budaya yang akan meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan.

Upaya-upaya meningkatkan dinamika masyarakat dan daya penggunaan terhadap potensi desa, pemerintah memberikan bimbingan, mengarahkan, pengawasan dan pembinaan. Kesemuanya itu sangat ditunjang juga dengan management pemerintahan yang baik agar apa yang menjadi sasaran dan tujuan pembangunan nasional dan khususnya pembangunan pedesaan.

Tujuan pembangunan desa merupakan bagian dari tujuan pembangunan nasional yang dilakukan secara terpadu, terarah demi terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Dari itulah tujuan pembangunan desa adalah merupakan pembinaan dibidang politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan mewujudkan wawasan Nusantara dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Jadi dengan demikian pembangunan desa diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat yang merata, adil dan meletakkan landasan kuat terhadap tahap pembangunan berikutnya. Pembangunan desa dengan arah jangka panjang diarahkan untuk mengembangkan desa-desa di Indonesia menuju pembangunan desa "tinggal landas" dan juga dapat menunjang sektor-sektor untuk prioritas pembangunan nasional.

C. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kepala Desa

Kedudukan hukum Pemerintah Desa sebagai suatu organisasi pemerintahan terendah yang berkedudukan hukum dan berada langsung dibawah camat. Pemerintah Desa dalam menjalankan tugasnya dibawah koordinasi Kepala Wilayah Kecamatan, karena Pemerintah Desa secara hirarki berada di bawah Organisasi Pemerintah Wilayah Kecamatan.

Pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa dan Lembaga Musyawarah Desa (LMD). Dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Perangkat Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan

Kepala Dusun, sedang Sekretaris Desa sendiri dibantu oleh beberapa Kepala Urusan sesuai kebutuhan masing-masing Desa.

Menurut Undang-Undang No.5 Tahun 1979, Kepala Desa mempunyai kedudukan hukum yang sangat menentukan akan keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Adapun kedudukan hukum Kepala Desa sebagai berikut :

1. Berkedudukan sebagai alat Pemerintah Desa disamping LMD dalam kedudukan ini Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan segala urusan rumah tangganya sendiri melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta menumbuhkan dan mengembangkan semangat gotong royong masyarakat dalam pembangunan desa.

2. Kedudukannya sebagai pemimpin desa Pemerintah Desa.

Sebagai pemimpin dan penguasa tunggal di daerahnya Kepala Desa, sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah dari itu Kepala Desa harus mempertanggung jawabkan keberhasilan pelaksanaan pemerintahan, Pembangunan dan pembinaan

masyarakat di desanya.

3. Kedudukan Kepala Desa sebagai penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta menjaga ketertiban dan keamanan di desanya masing-masing, maka Kepala Desa di bertahak, wewenang dan kewajiban.

Adapun hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa adalah sebagai berikut :

a. Hak Kepala Desa, terdiri atas :

- Hak untuk mengajukan atau mengusulkan pengangkatan dan atau pemberhentian perangkat desa.
- Berhak atas kerja sama dengan desa lain dalam hal pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, meningkatkan keamanan dan ketertiban.
- Berhak menunjuk orang (seorang) atau beberapa orang wakil dari desa di dalam maupun diluar pengadilan.
- Berhak mengatur penyelenggaraan administrasi pemerintah desa.
- Berhak mewakili desa di dalam maupun diluar pengadilan.

b. Mewenang Kepala Desa, terdiri dari atas :

- Berwenang menumbuhkan serta membina semangat dan jiwa gotong royong dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah, pembangunan, pembinaan masyarakat dan ketertiban serta ketentraman termasuk pembinaan dan pengembangan adat istiadat di desanya masing-masing.
- Berwenang memimpin rapat-rapat LMD dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui jalur LKMD

c. Kewajiban Kepala Desa terdiri atas :

- Berkewajiban melaksanakan dan menjunjung tinggi keputusan desa dan keputusan kepala desa.
- Berkewajiban menyusun anggaran penerimaan dan pengeluaran desa Setiap tahunnya dan mempertanggung jawabkannya.
- Wajib melaksanakan tertib administrasi pemerintahan pada umumnya dan pemerintahan desa pada khususnya.
- Wajib melaksanakan pembangunan dan pembinaan masyarakat termasuk pembinaan terhadap P4 dan Ideologi negara.
- Berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan

Tahun (RPTA). Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT), dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan menengah.

- Wajib menggali dan memelihara sumber-sumber pendapatan dan kekayaan dasarnya.
- Berkewajiban menyelesaikan perselisihan yang terjadi dalam desanya.

4. Kepala Desa dalam kedudukannya sebagai penyelenggaraan utama dibidang pemerintahan, pemban-
 sunan dan pembinaan masyarakat mempunyai hak dan wewenang serta kewajiban sebagai berikut :

a. Hak Kepala Desa

- berhak melaksanakan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.
- berhak memperoleh pembinaan, bimbingan dari pemerintah tingkat atasnya.
- berhak atas pelaksanaan tugas dekonstrasi, desentralisasi dan tugas pembantuan.

b. Wewenang Kepala Desa

- berwenang pula mengadakan koordinasi fungsional.
- berwenang atas pembinaan tertib pemerintahan (Pemerintah Pusat, Daerah dan Kecamatan) atau dengan kata lain pemerintahan tingkat atasnya.
- berkewajiban memelihara dan meningkatkan ketertiban dan ketentuan Serta Ideologi Negara, Politik dalam negeri dan semangat kesatuan Bangsa.

c. Kewajiban Kepala Desa

- Berkewajiban melaksanakan tugas lain yang dibebankan kepadanya dari pemerintah tingkat atasnya dan melaporkan kepada pejabat yang memerintahkan hasil pelaksanaan tugas di maksud.

- Berkewajiban memelihara dan meningkatkan ketertiban dan ketentraman.
- Berekwajiban melanjutkan, memelihara hasil-hasil pembangunan.

Selain itu ada juga disebut lembaga Musyawarah Desa (LMD) yang berkedudukan sebagai partnership Kepala Desa dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat termasuk ketertiban dan ketentraman dalam desanya.

Dalam kedudukannya, maka Lembaga Musyawarah Desa merupakan wadah tempat menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yaitu :

- a. membahas rencana desa untuk di jadikan keputusan desa guna di laksanakan oleh kepala desa.
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi dan pendapat warga masyarakatnya.
- c. menjadi panitia penyelenggara pemilihan kepala desa dan melaksanakan pencalonan pemilihan kepala desa.
- d. memberikan pertimbangan kepada Kepala desa dalam pencalonan pengangkatan dan pemberhentian perangkat-perangkat desa.

Sekertaris Desa berkedudukan sebagai pembantu kepala desa dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat yaitu :

- a. bertugas menyelenggarakan administrasi pemerintahan, pembangunan pembinaan masyarakat serta memberikan pelayanan dibidang ketata Usahaan kepada kepala Desa.
- b. bertugas sebagai unsur staf dan membantu pemimpin di bidang ketata Usahaan dan juga sebagai Sekertariat desa.

Kepala-kepala Urusan sebagai perangkat pemerintah desa juga mempunyai kedudukan sebagai berikut :

- a. bertugas menyelenggarakan pembinaan administrasi ketata Usahaan dibidangnya masing-masing.
- b. berkedudukan sebagai pembantu Sekertaris Desa dalam memberikan pelayanan ketata Usahaan kepada Kepala desa sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Kepala Dusun juga mempunyai kedudukan sebagai berikut :

- a. Dalam kedudukan hukum, Kepala Dusun menyelenggarakan tugas dan fungsi Kepala Desa dalam wilayah kerjanya masing-masing.
- b. Berkedudukan sebagai Unsur pelaksana tugas kepala desa dalam wilayah kerjanya masing-masing.

Walaupun nampaknya kedudukan hukum pemerintah desa dan perangkat-perangkatnya kelihatan berbeda, namun merupakan suatu jaringan kerja yang sama untuk demi terwujudnya tertib pemerintahan.

- Tugas-tugas Pemerintah Desa

Tugas Pemerintah desa dan Kelurahan dan perangkat-perangkatnya pada dasarnya adalah sama. Pemerintah desa dan Pemerintah kelurahan berorientasi pada pelaksanaan segala urusan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan ketertiban serta ketentraman.

Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri No.44 tahun 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerinta Kelurahan dan peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 1983 tentang susunan organisasi dan tata Kerja

Pemerintah Desa telah dijabarkan engan peratruran daerah Sekabupaten yang telah dirumuskan masing-masing tugas Kelurahan dan Desa.

Tugas Kepala Desa

- a. menjalankan Urusan rumah tanggany sendiri.
- b. meneumbuhkan serta menggerakkan semangat gotong royong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desa.
- c. menjalankan Urusan Femerintah Daerah dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban di wilayah desanya.

Perlu juga di ketahui bahwa kepala desa hanya sedikit berbeda dengan tugas Pemerintahan Kelurahan, yaitu pada pelaksanaan urusan rumah tangga desa. Sedangkan persyaratan untuk menjabat sebagai Pemerintah Desa adalah bukan pegawai Negeri, dan persyaratan sebagai pejabat Kelurahan otomatis harus golongan pegawai Negeri. Mengenai Urusan pembiayaan Femerintah desa di bebaskan oleh pemerintah Desa itu sendiri, sedangkan Pemerintah Kelurahan adalah tanggungan Daerah.

Mengenai tugas sekertaris desa adalah menyelenggara-kan pembinaan administrasi Pemerintah desa dan pelayanan staf.

Selain itu yang tak kurang pentingnya adalah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD). LKMD sebagaimana di atas dalam Keputusan Presiden RI No. 28 tahun 1980 Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 255 tahun 1980 mempunyai

tugas membantu Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam :

- a. menyelenggarakan dan meningkatkan prakarsa dan partisipasi masyarakat untuk pembangunan secara terpadu, baik yang berasal dari berbagai kegiatan pemerintah maupun swadaya gotong royong masyarakat.
- b. menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat untuk mengembangkan ketahanan di Desa dan Kelurahan.
- c. merencanakan pembangunan yang didasarkan atas musyawarah.

Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Kelurahan dapat di ketahui bahwa :

1. Kepala desa dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati/ Walikota/ Kepala Daerah Tingkat II melalui Camat. Kepala Desa tidak bertanggung jawab kepada Lembaga Masyarakat Desa (LMD) melainkan hanya menyampaikan keterangan pertanggung jawaban sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
2. Kepala Kelurahan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota/ Kepala Daerah Tingkat II melalui Camat. Sedangkan Kelurahan dalam wilayah Kota Administratif, dan Kepala Kelurahan tidak bertanggung jawab kepada LMD oleh karena dalam Pemerintah Kelurahan LMD memang tidak ada dan juga tidak bertanggung jawab kepada LKMD.
3. Sekretaris Desa, Sekretaris Kelurahan, Kepala Dusun dan Kepala Lingkungan masing-masing bertanggung jawab kepada Kepala desa dan Kepala Kelurahan atas pelaksanaan tugas dan fungsinya masing-masing.
4. Kepala-kepala urusan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing bertanggung jawab kepada Sekretaris Desa dan Kelurahan di mana bersangkutan sebagai kepala-kepala urusan.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Desa Libureng

Desa Libureng adalah salah satu Desa Jari 16 buah Desa yang terdapat di Kecamatan Tonra Kabupaten Daerah Tingkat II Bone. Lokasi desa ini terletak didaerah datar dengan jarak 45 Km dari pusat Kota Watampone. Desa ini merupakan jalan-jalan propinsi yang menghubungkan daerah-daerah sekitarnya, sehingga dengan demikian untuk menjangkau desa ini tidaklah merupakan masalah.

Secara historis penamaan desa Libureng berdasar pada cerita rakyat yang berkembang dalam masa atau delade tersebut. Pada suatu waktu seorang Raja yang bergelar Opu dari Kerajaan Luwu bermimpi melihat seorang perempuan sangat cantik yang beserta dayang-dayangnya, dimana dalam mimpinya, perempuan itu seakan menjadi kenyataan berada dijasirah selatan atau tepatnya didaerah kerajaan Bone. Raja (Opu) tersebut sepakat dengan bawahannya atau pengikutnya untuk mencari dimana perempuan itu berada dan bertekad tidak akan kembali sebelum menemukan perempuan yang diimpikannya. Dengan segala perlengkapan Raja (Opu) dari kerajaan Luwu dengan segenap pengikutnya berangkat kekerajaan Bone dengan perahu melalui teluk Bone. Dalam perjalanan ke Kerajaan Bone. Perahu yang ditumpangi oleh

Raja (Opu) beserta pengikutnya di Pasi Panggadang (tempat penantian atau menunggu), dari itu sehingga pasi tersebut dinamakan pasi panggadang. Pasi panggadang tersebut terletak di pesisir pantai di Kecamatan Tonra dan sampai sekarang tempat tersebut masih dianggap angker para nelayan.

Setelah menunggu beberapa saat, Raja (opu) dari kerajaan Luwu tersebut melanjutkan perjalanan menelusuri sungai akhirnya sampai di Laputteng yang sebenarnya "Opu Te" dan sekarang kampung itu dinamakan Laputteng. Selanjutnya Raja (Opu) beserta pengikutnya bergerak menuju arah utara dan akhirnya sampai suatu kampung yang sekarang di namakan Libureng, karena ditempat itulah Raja (Opu) dari kerajaan Luwu mengadakan musyawarah untuk mencari wanita yang mereka impikan itu karena firasatnya berada disekitar kampung itu. Setelah mengadakan musyawarah lahirilah suatu kata sepakat atau keputusan yang pada dasarnya tidak boleh diganggu gugat, maka kampung tersebut dinamakan Lebureng. Dalam pencarian wanita yang diimpikan itu ternyata dapat ditemukan disekitar permandian. Jompi yang namanya sekarang Lompo. Sedangkan nama aslinya Ompo, karena disitu diketemukan wanita yang dicarinya dan ternyata wanita tersebut adalah anaknya Arung Rappa beserta dengan dayang-dayangnya.

Pada jaman Kerajaan Bone, daerah ini juga merupakan

areal perburuan karena sebagian daerahnya adalah hutan yang mana sangat potensi dengan binatang buruan seperti rusa. disamping itu merupakan juga tempat peristirahatan raja-raja Bone beserta keluarganya, sebab daerah ini hawanya sejuk. Daerah ini terdapat sumber mata air dinamakan Jompi yang selalu ramai didatangi, baik dari daerah tersebut maupun orang dari luar. Bahkan ada yang melepaskan hajad ditempat ini karena masih dianggap dapat memberi berkah utamanya bagi anggota masyarakat yang baru saja melaksanakan pesta perkawinan.

Berdasarkan latar belakang sejarah desa Libureng akhirnya cukup dikenal, khususnya daerah Bone pada jaman dahulu sampai sekarang.

Desa Libureng merupakan desa induk yang telah dimekarkan dan dibentuk satu desa, yaitu desa Samaenre yang terpisah secara administratif atau mengurus rumah tangganya masing-masing walaupun penduduk dan antara kedua desa tersebut secara administratif sudah terpisah dengan perangkat masing-masing, seperti kepala desa/aparat dan masyarakat, akan tetapi penduduk masih merupakan suatu ikatan kekeluargaan.

Desa Libureng merupakan desa tertua diantara desa-desa ada di Kecamatan Tonra dan mempunyai 2 (dua) dusun yaitu dusun Campaniga dan dusun Bantileng. Dari masing-masing dusun tersebut terdiri dari 4 (empat) RW dan 8 (delapan) Desa Libureng selama terbentuknya sampai

sekarang ini telah dibina oleh 5 (lima) orang kepala desa, diantaranya 3 (tiga) definitif 2 (dua) orang pejabat sementara.

B. Geografis

1. Letak dan Keadaan Iklim

Desa Libureng adalah salah satu desa dari 16 buah desa yang terdapat di Kecamatan Tonra, Kabupaten Daerah Tingkat II Bone dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan desa Samaenre.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Te'uk Bone.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan desa Padatuo.
- Sebelah Barat berbatasan dengan desa Rappa.

Lokasi desa ini terletak dan jarak 45 Km dari pusat Kota Watampone (Ibu Kota Kabupaten), juga merupakan jalur jalan propinsi yang menghubungkan daerah-daerah sekitarnya sehingga dengan demikian, untuk menjangkau desa tidak merupakan masalah. Dengan terdapatnya jalan besar yang menghubungkan desa ini, akhirnya merupakan trayek bus yang ramai dari berbagai macam tujuan, misalnya ke Kabupaten Sinjai, Bulukumba, Bantaeng dan daerah-daerah sekitarnya. Bahkan sekarang ini telah ada angkutan bus dari Ujung Pandang ke Desa Libureng. Sedangkan angkutan umum dari Kabupaten melewati desa ini, kadang-kadang 2 sampai 3 kali sehari. Dengan letak yang strategis demikian sehingga desa Libureng terasa ramai dari

jaringan jantung kota.

Desa Libureng mempunyai ketinggian 0 meter dari permukaan laut dan di belah oleh sungai Laputteng yang setengah melingkar dengan lebar 10-14 m yang bermuara di Teluk Bone dengan jarak 15 km dari hulu sungai. Untuk mencapai pinggir pantai belum ada jalan khusus, akan tetapi hanya melalui pematang empang karena memang daerahnya adalah areal pertambakan.

Sebagaimana pada umumnya daerah-daerah di Sulawesi Selatan, desa Libureng adalah beriklim tropis, dengan suhu minimum 20 C dan maksimum 30 C. Desa Libureng memiliki dua musim dengan berganti setengah tahun sekali, yaitu musim barat yang terjadi dalam bulan Desember sampai bulan Mei dan sebaliknya pada musim timur terjadi bulan Juni sampai dengan bulan Nopember.

2. Luas Wilayah dan Pembagian Administrasi Pemerintahan

Setelah pemekaran desa Libureng mempunyai luas wilayah adalah 20 km. Dengan luas wilayah ini berdasarkan administrasi pemerintahan di bagi dalam 2 (dua) buah dusun yaitu :

1. Dusun Campaniga
2. Dusun Bantileng

3. Lahan

Penggunaan lahan (tanah) di desa Libureng pada umumnya dibelah sedemikian rupa sehingga mencerminkan

bahwa lahan-lahan tersebut cukup berproduksi, hal ini nampak dari klasifikasi penggunaan lahan sebagai berikut:

Tabel 1
LUAS PENGGUNAAN TANAH DI DESA LIBURENG

Penggunaan Tanah	Luas (Ha)
Perumahan/ Pemukiman	7,5
Tanah Sawah / Tanah hujan	189
Tanah darat / Perkebunan.	125
Pertambakan	55
Jalan Daerah / Propinsi	2,5
Jalan Desa / Lorong	3,5
Lapangan Olah Raga	0,5
Perkebunan	3
Sungai	5
Hutan Tutupan / Kawasan	350
Kebun Negara / Prota Camming	245
Perkebunan Rakyatola	125
Areal Penghijauan	87
Pekarangan	7,5
Jumlah	1205,5

Sumber : Kantor Desa Libureng, 1994

Berdasarkan dari tabel 1 di atas, dapat diketahui bahwa di desa Libureng adalah terdapat 1205,5 tanah yang sudah di kelola. Dari sejumlah areal itu, sebagian besar merupakan tanah pertanian dan perkebunan rakyat dan kebun Negara.

C. Demogratis

1. Keadaan Penduduk

Penduduk desa Lebureng pada umumnya adalah penduduk asli. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin perbandingannya hampir seimbang. Berdasarkan data yang di peroleh

pada kantor desa Libureng bahwa keadaan penduduk hingga tahun 1994 berjumlah 839 jiwa yang terdiri dari 406 jiwa laki-laki dari 433 jiwa perempuan. Dan jumlah rata-rata anggota keluarga dari penduduk desa libureng ini adalah antara 5-7 orang. Pada tahun 1994 tercatat jumlah kepala keluarga adalah 147 KK. Pada tahun 1994 rata-rata kepadatan penduduk adalah sekitar 45 jiwa / km.² ini dibandingkan dari luas wilayahnya yaitu 20 km².

Dengan memperhatikan kepadatan penduduk di desa Libureng dibandingkan dengan sumber daya alam yang tersedia, maka nampaklah bahwa lapangan kerja cukup potensial. Pertambahan penduduk yang cukup berarti dengan diiringi dengan menempatkan keterampilan anggota masyarakat faktor alam yang potensial ini, akan lebih dapat di manfaatkan untuk masyarakat setempat dan daerah lainnya.

Komposisi penduduk menurut mata pencaharian dan keadaan alam yang hampir sama. Pada umumnya masyarakat berusaha dalam lapangan pertanian adalah 95 % sedangkan lainnya berusaha dibidang perdagangan, pengangkutan pengairan dan jasa-jasa adalah 5%.

Pada umumnya penduduk tinggal di tepi jalan raya, sungai seperti penduduk yang bermukim di sekitar sungai Laputteng. Daerah pertama adakalanya terdapat jauh dari tempat tinggal sebagian penduduk. Bahkan ada penduduk

meninggalkan kampung untuk beberapa lama dan menetap diladang pada musim panen atau kegiatan untuk mengolah tanah dan memelihara tanaman yang sedang tumbuh.

Selanjutnya bahwa pertumbuhan penduduk dalam wilayah desa Libureng pada dasarnya di pengaruhi oleh faktor kelahiran dan kematian serta faktor lain seperti adanya kelompok penduduk pergi ke kota-kota besar untuk melanjutkan pendidikan. Selain itu masyarakat desa Libureng sebagian penduduknya suka merantau tidak saja ke Propinsi lain bahkan ada yang keluar negeri seperti Malaysia. Dari itulah faktor yang mempengaruhi perkembangan penduduk di desa Libureng adalah sebagaimana telah di sebutkan di atas.

Untuk lebih jelasnya, jumlah penduduk desa Libureng berdasarkan kelompok umumnya dapat terlihat pada tabel berikut :

TABEL 2
KOMPOSISI PENDUDUK DESA LIBURENG MENURUT KELOMPOK UMUR

NO	Kelompok Umur	Laki-laki	P perempuan	Jumlah
1	0 - 4 tahun	25	22	47
2	5 - 14 tahun	120	110	230
3	15 - 24 tahun	109	107	216
4	25 - 54 tahun	150	170	320
5	55 tahun ke atas	15	11	26
	Jumlah			839 jiwa

Sumber : Kantor Desa Libureng, 1994

Berdasarkan tabel 2 di atas, terlihat bahwa kelompok umur yang terbanyak adalah penduduk Usia kerja yaitu berumur 25 - 54 tahun. Sedangkan penduduk Usia kerja pada kelompok Umur 15 - 24 tahun dan yang belum berusia kerja adalah 0 - 14 tahun dan Umur 55 tahun ke atas. Dengan demikian dari struktur penduduk seperti itulah, mengabarkan bahwa sebagian besar penduduk desa Libureng termasuk ke dalam kelompok Usia kerja (produktif).

2. Sumber Perekonomian

Berdasar dari letak geografis desa Libureng yang merupakan dataran berbukit-berbukit, rawah-rawah dan daerah pinggir laut, demikian halnya dengan faktor iklim dan musim, sehingga dengan demikian itu yang memberi corak terhadap mata pencaharian sebagian besar penduduknya.

Mata pencaharian penduduk desa Libureng adalah mayoritas bertani dalam pengertian luas yang meliputi menanam padi, berkebun tanaman muda/keras, berkebun buah-buahan, berternak, mencari ikan (nelayan) dan petani tambak. Hanya sebagian kecil saja dari penduduk desa Libureng yang mencari hidup dari mata pencaharian lain seperti bidang wiraswasta, pertukangan, karyawan dan pegawai negeri. Sebagian pegawai, umumnya, bekerja sebagai guru. Untuk mengetahui keadaan penduduk desa Libureng berdasarkan dari mata pencahariannya tergambar jelas pada tabel berikut :

Tabel 3
JUMLAH PENDUDUK DESA LIBURENG MENURUT
MATA PENCAHARIAN KEADAAN TAHUN 1994

NO	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Wiraswasta	5 orang
2	Pertukangan	15 orang
3	Petani	130 orang
4	Karyawan	17 orang
5	Pensiunan	2 orang
6	Nelayan	33 orang
7	Peternak	95 orang
8	Pegawai Negeri	36 orang
9	Abri	3 orang

Sumber : Kantor Desa Libureng, 1994

Usaha-usaha pertanian yang di lakukan oleh penduduk desa Libureng, sebagian digambarkan berbagai kegiatan lain. Ada kalanya seorang petani sehabis bekerja di sawah atau di kebun (ladang) juga melakukan usaha-usaha lainnya. Adanya kegiatan pertanian yang tidak hanya menjurus kepada satu usaha saja, berlatar belakang dari keadaan tanahnya, tanah subur dan juga usaha-usaha lainnya mempunyai peluang yang cukup baik.

3. Agama

Agama yang dianut penduduk desa Libureng berdasarkan dari Prosentasenya adalah 100% menganut agama Islam sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4
JUMLAH PENDUDUK MENURUT AGAMA
DESA LIBURENG DALAM TAHUN 1994

NO	Jenis Agama	Jumlah Penganut
1	Islam	839 orang
2	Kristen Protestan	-
3	Kristen Katolik	-
4	Hindu	-
5	Budha	-

Sumber : Kantor Desa Libureng, 1994

4. Pendidikan

Dengan keadaan sekarang keadaan penduduk cukup berkembang. Keinginan melanjutkan pendidikan dari anggota masyarakat baik dewasa ini maupun sebelumnya, cukup besar. Hampir semua anggota masyarakat ingin melanjutkan pendidikan anaknya ke pendidikan menengah atas. Bagi lulusan SLTP yang ingin melanjutkan ke SMTA selain sekolah di lingkungan Kecamatan Tonra sendiri atau Kecamatan di sekitarnya, ada juga yang melanjutkan pendidikan ke ibu kota propinsi (Ujung Pandang). Begitu pula halnya minat anggota masyarakat (Penduduk) terhadap pendidikan tinggi cukup besar. Ini terbukti banyak lulusan SMTA yang mendaftar setiap penerimaan mahasiswa di perguruan tinggi khususnya di Ujung Pandang. Selain itu banyak juga lulusan Universitas Akademi berasal dari daerah ini. Untuk memberi gambaran yang

jelas terhadap tingkat pendidikan penduduk di desa Libureng dapat di lihat dalam tabel di bawah ini :

TABEL 5
JUMLAH PENDUDUK MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN DESA
LIBURENG DALAM TAHUN 1994

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Tidak pernah Sekolah	26
2	Tidak tamat SD	15
3	Tamat SD / Sederajat	117
4	Tamat SLTP / Sederajat	295
5	Tamat SLTA / Sederajat	125
6	Tamat Akademi	5
7	Tamat Perguruan Tinggi	22

Sumber : Kantor Desa Libureng, 1994

Pada Tabel 5 di atas, berdasarkan tingkat penduduk di desa Libureng mayoritas adalah yang tamat SLTP / Sederajat yaitu 295 orang dan selanjutnya yaitu 22 orang telah menyelesaikan Studinya di Perguruan Tinggi. Selain itu ada 5 orang yang menyelesaikan Studinya di tingkat Akademi. Dari keadaan golongan Sarjana tersebut kebanyakan bertugas di daerah lain.

D. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa libureng

Pemerintahan desa dijalankan dan di pertanggung jawabkan oleh Kepala Desa Dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh perngkaat desa.

Sehubungan dengan itu pada pasal 3 Undang-Undang NO. 5 Tahun 1979 di tekankan bahwa :

- "(1) Pemerintah desa terdiri atas :
- a. Kepala Desa
 - b. Lembaga Musyawarah Desa.
- (2) Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat Desa
- (3) Perangkat Desa terdiri atas :
- a. Sekertaris Desa
 - b. Kepala-kepala Dusun.
- (4) Susunan organisasi dan tata kerja pemerintah Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatas dengan peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (5) Peraturan daerah yang dimaksud dalam ayat (4) baru berlaku sesudah ada pengesahan dari pejabat yang berwenang"

Selanjutnya pada Pasal 17 ayat (1) UU NO.5 Tahun 1979 dijelaskan bahwa :

Lembaga Musyawarah Desa adalah Lembaga Permusyawaratan / permufakatan yang keanggotaannya terdiri atas Kepala-kepala Dusun, Pimpinan Lembaga-lembaga kemasyarakatan dan pemuka-pemuka masyarakat di desa yang bersangkutan.

No. 5 Tahun 1979 bahwa :

"Sekertaris Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam menjalankan hak, wewenang dan kewajiban pimpinan pemerintah desa (pasal 19 UU No 5 tahun 1979)

- (1) Sekertaris Desa terdiri atas :
- a. Sekertaris Desa;
 - b. Kepala-Kepala urusan

- (2) Sekretaris Desa diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II setelah mendengarkan pertimbangan Lembaga Musyawarah Desa.
- (3) Apabila kepala Desa berhalangan maka sekretaris Desa menjalankan tugas dan fungsi Kepala Desa sehari-hari.
- (4) Kepala-kepala Urusan diangkat dan diberhentikan oleh Camat atas nama Bupati/ Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II atas usul kepala Desa.
- (5) Syarat-syarat pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Desa dan kepala-kepala urusan diatur dalam Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pada pasal 16 ayat (2) UU No 5 Tahun 1979 disebutkan bahwa Kepala Desa adalah unsur pelaksana tugas kepala Desa dengan wilayah kerja tertentu dengan demikian Pemerintah Desa tidak sewenang-wenang mengadakan pungutan atau penyusunan perangkat desa dengan berbagai alasan karena semua itu telah diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri yang ditetapkan dalam suatu peraturan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 1981
Pasal 2 ditetapkan bahwa:

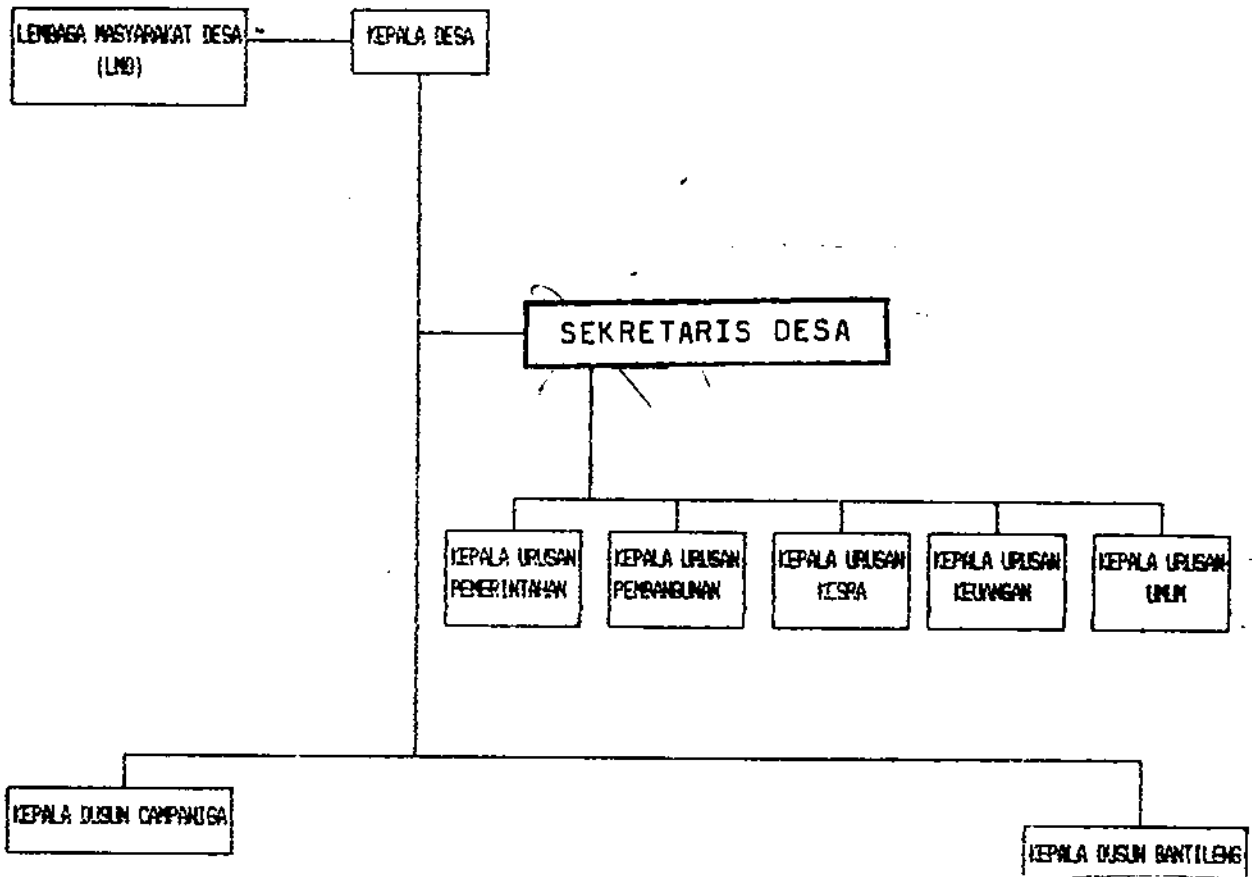
- "(1) Susunan Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari :
- a. Kepala Desa
 - b. Lembaga Musyawarah Desa
 - c. Perangkat Desa
- (2) Susunan Organisasi lembaga Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. Ketua
 - b. Sekretaris
 - c. Anggota
- (3) Jumlah Anggota Lembaga Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c adalah sedikitnya 9 (sembilan) orang dan sebanyak-sebanyaknya 15 (lima belas orang) tidak termasuk Ketua dan Sekretaris.
- (4) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c terdiri dari :
- (a) Sekretaris Desa
 - (b) Kepala-kepala Dusun.
- (5) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a terdiri dari :

- (6) Jumlah Kepala Urusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf terdiri dari sedikitnya 3 (tiga), yaitu Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Pembangunan dan Kepala Urusan Umum dan Sebanyak-banyaknya 5 (lima) yaitu Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Keuangan dan Kepala Urusan Umum.
- (7) Bagan susunan Organisasi Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa sebagai dimaksud dalam ayat (1), (2), (3), (4) Dan (5).

Berdasarkan dengan susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Daerah dengan perangkat Pemerintah Desa tersebut diatas, maka dalam hal ini sangat penting juga memberi gambaran yang jelas tentang Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Libureng karena dengan ini juga merupakan penentu bagi terselenggaranya tugas-tugas pembangunan. Dengan Organisasi yang terstruktur dapat memudahkan untuk mengontrol membimbing serta membina aparatnya dan masyarakatnya khususnya. Masyarakat Desa Libureng ini juga menyangkut bahwa tugas pembangunan bukan saja menjadi tugas dan tanggung jawab kepala Desa dan apatnya, akan tetapi masyarakat perlu juga ikut berpartisipasi, jadi dengan ini menandakan Kepala Desa Sebagai Administrator pembangunan, khususnya sebagai Motivator (pemberi motivasi) terhadap masyarakat terhadap

masyarakat, terhadap segala sektor Pembangunan Untuk lebih jelasnya bagaimana pentingnya kedudukan Kepala Desa beserta aparatnya ikut Bertanggung jawab terhadap pembangunan di desa, Utamanya di desa Libureng. Mengenai Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Libureng sebagaimana dimaksud tersebut, dapat terlihat pada Bagan yang terlampir.

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN
DESA LIBURENG KECAMATAN TONRA



E. Pembangunan Desa Libureng

1. Pertanian

Sebagian besar penduduk Desa Libureng adalah hidup dalam bidang pertanian, karena kebutuhan masyarakat masih tergantung dari potensi-potensi dalam desa tersebut. Oleh karena itu sadar akan pentingnya kedudukan dalam rangka pembangunan negara maka pemerintah selalu meningkatkan perhatiannya ke desa-desa termasuk di desa Libureng ini.

Dalam pembangunan dibidang pertanian dalam arti yang luas, telah dikembangkan untuk meningkatkan produksi dan memperkuat penganeka ragam hasil pertanian untuk kebutuhan pangan dari peningkatan pendapatan dan taraf hidup petani, peternak, nelayan dan lain-lain di desa-desa begitu halnya di Desa Libureng. Hal ini juga penting sebagai upaya untuk dapat memberikan bantuan pada perkembangan pada sektor lainnya. Dalam bidang pertanian tanaman pangan telah memberi dampak yang cukup baik dalam dekade terakhir ini. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 6
 LUAS AREAL PRODUKSI TANAMAN PANGAN
 DESA LIBURENG DALAM TAHUN 1994

NO	Jenis Tanaman	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)
1	Padi	189,68	756
2	Kacang Hijau	15	22,5
3	Kacang Tanah	10	15
4	Tanaman Perkebunan	6	-

Dari tabel diatas, menunjukkan bahwa produksi padi terbesar dari sekian produksi tanaman pangan lainnya. Produksi tanaman kacang hijau juga agak menunjukkan peningkatan dibanding dengan kacang tanah. Hal ini disebabkan karena luas lahan yang sangat sempit.

2. Peternakan

sistem peternakan di desa Libureng sebagian masih merupakan cara tradisional seperti peternakan Kerbau, sapi, kambing, kuda serta ayam dan itik. Hal ini diakibatkan tidak tersedianya tempat atau areal yang cukup untuk peternakan dan juga disebabkan karena adanya keragu-raguan dari sebagian anggota masyarakat untuk enggang mengusahakan tempat peternakan agak jauh dari tempat kediamannya karena seringnya ada pencurian hewan di desa ini. Tapi dari semua jenis peternakan di desa Libureng, jenis ternak ayam merupakan usaha yang telah dilakukan dengan cara modern sebagai mana telah diusahakan di daerah-daerah

lain. Cara tersebut yaitu dengan membuat kandang atau tempat tertentu dengan pengadaan jumlah yang besar, sehingga saat sekaran ini telah menunjukkan peningkatan produksi yang besar dibandingkan dengan jenis ternak itik. Dari tabel berikut akan tergambar berikut :

Tabel 7
JENIS DAN JUMLAH TERNAK DI DESA LIBURENG
DALAM TAHUN 1994

NO	Jenis Ternak	Jumlah
1	Kerbau	58 ekor
2	Sapi	77 ekor
3	Kuda	29 ekor
4	Kambing	125 ekor
5	Ayam	7.500 ekor
6	Itik	1.350 ekor

Sumber : Kantor Desa Libureng, 1994

3. Perdagangan

Penduduk desa Libureng dalam bidang perdagangan telah diusahakan yang berupa tempat penjualan, toko atau kios serta koperasi disamping dengan perdagangan antara daerah-daerah sekitarnya. Pada tabel berikut dapat dilihat jenis dan jumlah prasarana perdagangan

Tabel 6
JENIS DAN JUMLAH PRASARANA PERDAGANGAN
DI DESA LIBURENG DALAM TAHUN 1994

NO	Jenis Prasarana	Jumlah (buah)
1	Toko/Kios	15
2	Koperasi	1
3	Pasar	-

Sumber : Kantor Desa Libureng, 1994

Pada tabel tersebut di atas, menunjukkan bahwa prasarana perdagangan belum dianggap memadai karena belum tersedianya pasar, padahal didaerah ini sangat cocok diusahakan karena mengingat daerah tersebut sangat potensi dengan hasil bumi untuk memasarkannya. Saat sekarang ini, masyarakat untuk memasarkan hasil bumi selain didatangi pembeli dari luar, juga masyarakat memasarkan sendiri ke ibukota kabupaten (Watampone) atau daerah-daerah sekitarnya. Sedangkan toko/kios untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat sudah dianggap memadai dan juga tersedianya satu koperasi unit desa di daerah tersebut.

4. Perhubungan

Dalam bidang perhubungan juga merupakan hal yang tak kurang pentingnya untuk menunjang pembangunan di segala bidang, utamanya pembangunan masyarakat desa.

Prasarana perhubungan merupakan alat untuk memperlancar arus lalu lintas, khususnya dalam bidang komunikasi dan utamanya kelancaran ekonomi yaitu pemasaran hasil produksi.

Berdasarkan kenyataan itu, maka di desa Libureng dari tahun ke tahun telah diupayakan terus pembangunan dibidang prasarana perhubungan apalagi letak daerah ini adalah jalur jalan propinsi. Hal ini ditandai dengan perintisan jalan-jalan baru dan juga telah diupayakan merehabilitasi jalan yang rusak serta pembuatan jalan dan jembatan.

Tabel 9
PRASARANA PERHUBUNGAN DI DESA LIBURENG
KEADAAN TAHUN 1994

NO	Jenis Prasarana	Panjang/buah
1	Jalan : a. Jalan Aspal b. Jalan Diperkeras	3 km 4,5 km
2	Jembatan	3 buah

Sumber : Kantor Desa Libureng, 1994

Dari tabel tersebut di atas, prasarana perhubungan di desa Libureng cukup memadai sehingga masyarakat telah merasakan manfaatnya baik memperlancar hubungan lalu lintas, mempermudah pemasaran hasil produksi,

terselenggaranya penyampaian informasi yang cepat serta pembangunan dibidang sosial ekonomi dan sosial kemasyarakatan. Selain itu prasarana perhubungan khususnya dalam bidang transportasi di desa Libureng menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun sebagai tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 10
SARANA TRANSPORTASI DI DESA LIBURENG
DALAM TAHUN 1994

NO	Jenis Transportasi	Jumlah (buah)
1	Mobil Penumpang Umum	10
2	Sepeda Motor	50
3	Sepeda	121
4	Mobil Pribadi	2

Sumber : Kantor Desa Libureng, 1994

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa masyarakat dan pemerintah setempat saling menyadari akan pentingnya pemenuhan kebutuhan dibidang transportasi, ini terbukti dengan terjadinya peningkatan pengadaan alat-alat transportasi tersebut.

5. Prasarana Keagamaan

Pembangunan dibidang keagamaan yang menonjol adalah pengadaan akan pembangunan tempat-tempat ibadah, utamanya masjid sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 11
JENIS DAN JUMLAH PRASARANA KEAGAMAAN
DI DESA LIBURENG KEADAAN TAHUN 1994

NO	Jenis Prasarana	Jumlah (buah)
1	Masjid	2
2	Mushollah	1
3	Gereja	-
4	Kuil/pura	-

Sumber : Kantor Desa Libureng, 1994

Dari data tersebut di atas, prasarana keagamaan yang menonjol adalah masjid. Hal ini disebabkan karena jumlah penduduk desa Libureng adalah beragama Islam, dengan demikian juga prasarana gereja dan kuil tidak ditemukan di desa ini.

6. Pendidikan

Pembangunan dibidang pendidikan adalah merupakan yang sangat penting artinya khususnya pada anak usia sekolah karena ini sebagai pengalihan estafet kepemimpinan dimasa datang. Dari itulah dalam upaya mempercepat usaha peningkatan dan perluasan kesempatan belajar bagi anak usia sekolah, pemerintah telah berusaha dengan kebijaksanaan yaitu membangun sekolah-sekolah yang baru. Untuk lebih jelasnya tergambar pada

tabel berikut :

Tabel 12
PRASARANA PENDIDIKAN DI DESA LIBURENG
KEADAAN TAHUN 1994

NO	Jenis Prasarana	Jumlah
1	Taman Kanak-kanak (TK)	1
2	Sekolah Dasar Negeri (SDN)	1
3	Sekolah Dasar Inpres (SD.Inp)	1
4	Sekolah Lanjutan Pertama	-
5	Sekolah Lanjutan Atas	-

Sumber : Kantor Desa Libureng, 1994

Selain pusat perhatian pada anak usia sekolah yang diberikan kesempatan untuk belajar, masyarakat desa yang tak pernah sekolah (buta huruf) atau pernah sekolah tapi tidak sempat menamatkan pelajaran juga memperoleh kesempatan untuk belajar dengan melalui cara program kejar paket A.

7. Prasarana Kesehatan

Pembangunan dibidang kesehatan juga sangat penting dalam masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan. Upaya pemerintah untuk menciptakan kondisei kesehatan yang layak telah diusahakan dengan jalan membangun prasarana kesehatan di desa-desa. Pada desa Libureng misalnya telah tersedia beberapa prasarana kesehatan

sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 13
JENIS DAN JUMLAH PRABARANA KESEHATAN
DI DESA LIBURENG KEADAAN TAHUN 1994

NO	Jenie Prasarana	Jumlah (buah)
1	Puskesmas Pembantu	1
2	Posyandu	2
3	Pos/Klinik KB	2

Sumber : Kantor Desa Libureng, 1994

Tenaga pelayan kesehatan di desa Libureng berdasarkan data yang diperoleh, yaitu mantri kesehatan, bidang dan perawat. Sedangkan bagian keluarga berencana terdapat 225 pasangan usia subur dan yang menjadi akseptor sebanyak 205 orang.

B. Komunikasi

Bidang komunikasi juga mendapat perhatian, karena dapat memberi atau memperoleh informasi serta input-input yang dapat menunjang proses pembangunan.

Sarana komunikasi meliputi televisi, radio, majalah serta surat kabar. Seperti misalnya di desa Libureng sarana komunikasi dapat dilihat pada tabel berikut .lm

Tabel 14
SARANA KOMUNIKASI DI DESA LIBURENG
KEADAAN TAHUN 1994

NO	Jenis Sarana	Jumlah (Buah)
1	Televisi	125
2	Radio	150

Sumber : Kantor Desa Libureng, 1994

selain itu di Desa Libureng juga telah ada koran masuk desa dan kelompok masyarakat seperti kelompon capir.

9. Penilaian Desa

Sebagai mana desa-desa lainnya di Kecamatan Tonra Kabupaten Bone, maka desa Libureng dapat digolongkan kedalam desa suasembada. Desa Libureng sudah tiga kali mendapat penghargaan dari pemerintah dalam rangka lomba desa Tingkat Kecamatan. Jadi dengan demikian diantara desa-desa di Kecamatan Tonra, maka desa Libureng telah mengukir prestasi. Dengan demikian desa Libureng selama ini mengalami proses pembangunan secara berkelanjutan diberbagai sektor.

BAB IV

HASIL PENGUMPULAN DATA DAN PEMBAHASAN

Peranan Kepala Desa sebagai Administrator pembangunan mencakup beberapa bagian, yaitu sebagai penggerak dan pendidik masyarakat (Dinamikator), penggugah dan pendorong masyarakat (Motivator), penggiat masyarakat (Katalisator), pengelola pembangunan (Organisator) pembaru dalam masyarakat (Inovator).

Pada bab ini, penulis hanya memusatkan perhatian pada peranan Kepala Desa sebagai Motivator Pembangunan di Desa Libureng, Kecamatan Lerna, Kabupaten Indragiri Barat.

A. Kepala Desa Sebagai Motivator Pembangunan

Dalam arti Kepala Desa Sebagai Motivator Pembangunan, adalah berperan untuk menggerakkan dan mendorong masyarakatnya, dengan berbagai kreasi, aksi, dan yang lebih baik, agar selanjutnya masyarakat dapat tergugah hatinya untuk ikut berperan serta dalam setiap kegiatan, utamanya kegiatan dalam rangka pembangunan di desanya. Berperan dapat diartikan sebagai suatu yang penting, karena Kepala Desa melakukan hal serta kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Selanjutnya agar Kepala Desa sebagai Motivator dapat berhasil dengan baik, maka Kepala Desa harus mampu menggerakkan minat, kemauan masyarakat melaksanakan pembangunan mampu memberikan perhatian terhadap perorangan, keluarga, kelompok, untuk membangkitkan kemampuan sikap membangun serta mempertahankan sikap daya serta usaha yang terencana gagasannya.

Berdasarkan dengan pengumpulan data yang penulis lakukan dengan jalan pengajuan pertanyaan dengan alternatif jawaban, yaitu sangat berperan, cukup berperan, kurang berperan dan tidak berperan. Sangat berperan diartikan sebagai tingginya tingkat pelaksanaan hak serta kewajiban sesuai dengan pedulukanya dalam pemerintahan di Desanya dan cukup berperan dianggap sebagai pelaksana tugas dan kewajiban yang cukup memadai. Sedangkan kurang berperan diartikan sebagai kurang terlibatnya secara aktif terhadap pelaksanaan setiap sektor pembangunan di Desa. Sedangkan tidak berperan adalah dianggap sebagai ketidaklibatan pada setiap kegiatan, utamanya dalam pembangunan Desa.

Bertitik tolak dari pengumpulan data yang penulis lakukan dengan jalan pengajuan pertanyaan terhadap 147 KK yang terdiri dari masyarakat, Kepala Desa dan Aparatnya yang menjadi responden ditemukan kriteria jawaban dari setiap sektor pembangunan yang utama, yaitu di bidang ekonomi sebanyak 50 responden bidang peningkatan ketrampilan 25 responden. Dalam bidang pembangunan dan pemeliharaan sarana penunjang didapatkan alternatif jawaban dari sejumlah 25 responden serta pembinaan kelembagaan sebanyak 47 responden. Frekuensi tanggapan responden terhadap kepala desa dalam usahanya menggerakkan minat, semangat dan kemauan masyarakat untuk

berpartisipasi dalam pembangunan di desa tersebut, maka dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 15

**TANGGAPAN RESPONDEN PENILAIAN TERHADAP KEPALA DESA
MENGGERAKAN MINAT, KEMAUAN DAN SEMANGAT MASYARAKAT
UNTUK BERPARTISIPASI DALAM PEMBANGUNAN.**

No.	Menggerakkan minat kemauan dan semangat masyarakat dalam pembangunan	Jumlah responden (%)
1.	Sangat berperan	25 (25,00)
2.	Cukup berperan	45 (45,00)
3.	Kurang berperan	17 (17,00)
4.	Tidak berperan	0
	Jumlah	87 (100%)

Sumber : Data responden, 1974.

Pada tabel tersebut diatas, da didapatkan jawaban dari 38 responden atau persentasenya 25,00 % menjawab "sangat berperan" dan 45 responden atau persentase 45% menjawab "cukup berperan" dan 17 responden atau persentase 17,00 % menjawab "kurang berperan" selanjutnya untuk pada jawaban "tidak berperan" tak ada responden yang menjawab.

Selanjutnya frekwensi tanggapan tersebut setiap tindakan dan keputusan yang dilaksanakan kepala desa terhadap masyarakat dalam setiap sektor pembangunan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 16

TANGGAPAN RESPONDEN PENILAIAN TERHADAP KEPALA DESA ATAS
TINDAKAN DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN BAGI MASYARAKAT UNTUK
PEMBANGUNAN

No.	Tindakan dan Pengambilan keputusan	Jumlah	
		F	%
1.	Sangat berperan	40	27,21
2.	Cukup berperan	90	61,72
3.	Kurang berperan	17	18,36
4.	Tidak berperan	-	-
	Jumlah	147	100,

Sumber : Data adalah responden, 1994.

Berdasarkan dengan tabel tersebut diatas, dapat diperoleh jawaban dari 27 responden atau presentase 18,36 % yang memeberi penilaian "kurang berperan", dan 90 responden atau presentasenya 61,72 % memberi jawaban "cukup berperan", selanjutnya 40 responden atau presentase 27,21% untuk jawaban "sangat berperan" serta pada kategori alternatif jawaban "tidak berperan " tidak ada responden yang menjawab.

Kepala desa sebagai penggerak minat, kemauan dan semangat serta mengambil keputusan bagi masyarakat dengan segala tindakan dan kebijaksanaan dilakukan, maka Kepala desa selalu berusaha untuk berpartisipasi sesuai dengan tuntutan pembangunan dan masyarakat agar apa yang menjadi tujuan pembangunan dapat tercapai dengan baik.

Lain itu, frekwensi terhadap kepala desa sebagai pendorong pada masyarakat untuk terjun dalam setiap sektor pembangunan dapat dilihat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 17

**TANGGAPAN RESPONDEN PENILAIAN TERHADAP KEPALA DESA
SEBAGAI PENDORONG MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN**

No.	Sebagai Pendorong Masyarakat Dalam Pembangunan	Jumlah	
		F	%
1.	Sangat berperan	40	27,21
2.	Cukup berperan	95	64,65
3.	Kurang berperan	12	8,16
4.	Tidak berperan	-	-
	Jumlah	147	100,

Sumber : Data olahan responden, 1994.

pada pengajuan pertanyaan, yaitu bagaimana penilaian bapak/ibu terhadap Kepala desa sebagai pendorong kepada masyarakat untuk terjun kesetiap sektor pembangunan. Dari itu diperoleh jawaban antara lain 40 responden atau presentase 27,21% menjawab "Sangat berperan" dan 95 responden atau presentasinya 64,65% menjawab "Cukup berperan" selanjucnya 12 responden atau presentase kurang berperan 8,16% menjawab "Kurang berperan" Untuk alternatif jawaban "tidak berperan" tidak seorangpun memberikan jawaban.

Sedangkan dalam memberikan petunjuk kepada perorangan, keluarga dan kelompok untuk membangkitkan kemauan dan sikap membangun pada masyarakat, tergambar pada tabel berikut :

Tabel 18

**TANGSAPAN RESPONDEN PENILAIAN TERHADAP KEPALA DESA
DALAM MEMBERIKAN PETUNJUK KEPADA PERORANGAN, KELUARGA
DAN KELOMPOK DALAM PEMBANGUNAN**

No.	Memberikan Petunjuk Kepada Perorangan, Keluarga dan Kelompok Dalam Pembangunan	Jumlah	
		F	%
1.	Sangat berperan	40	27,21
2.	Cukup berperan	95	64,65
3.	Kurang berperan	12	8,16
4.	Tidak berperan	-	-
	Jumlah	147	100,

Sumber : Data olahan responden, 1994.

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh jawaban antara lain 40 responden atau presentase 27,21% menjawab "Sangat berperan" dan 95 responden atau presentase 64,65% menjawab "cukup berperan". Selanjutnya 12 responden atau presentase 8,16% menjawab "Kurang berperan" sedangkan untuk alternatif jawaban "tidak berperan" tidak seorangpun tidak seorangpun responden memberikan jawaban.

Mengutamakan sikap mengajak dan memperkenalkan gagasan-gagasannya dalam pembangunan juga dinilai cukup

berperan sebagai mana yang diharapkan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 19

**TANGGAPAN RESPONDEN PENILAIAN TERHADAP KEPALA DESA
DALAM MEMPERKENALKAN GAGASAN-GAGASANNYA TERHADAP
PEMBANGUNAN**

No.	Memperkenalkan Gagasan-gagasannya Dalam Pembangunan	Jumlah	
		=	%
1.	Sangat berperan	50	34,05
2.	Cukup berperan	90	54,42
3.	Kurang berperan	17	11,56
4.	Tidak berperan	-	-
	Jumlah	147	100,

Sumber : Data pilihan responden, 1994.

Dari sumber tabel diatas jawaban yang diberikan yaitu terhadap 50 responden atau presentase 34,05% menjawab "Sangat berperan" dan 90 responden atau presentase 54,42% memberikan jawaban "cukup berperan" dan 17 responden dengan presentase 11,56% jawabannya "Kurang berperan". Selanjutnya pada jawaban "Tidak berperan" tidak ada responde yang menjawab.

Dalam menjalankan tugas pembangunan, Kepala Desa selalu menyertakan masyarakat. Hal ini nampak pada tabel dibawah ini :

Tabel 20

**TANGGAPAN RESPONDEN PENILAIAN TERHADAP KEPALA
DESA MENGUTAMAKAN MASYARAKAT DALAM
PEMBANGUNAN.**

No.	Mengutamakan Masyarakat Dalam Pembangunan	Jumlah	
		F	%
1.	Sangat berperan	40	27,21
2.	Cukup berperan	90	61,22
3.	Kurang berperan	17	11,56
4.	Tidak berperan	-	-
	Jumlah	147	100,

Sumber : Data olahan responden, 1994.

Pada tabel diatas, diperoleh jawaban dari 40 responden atau Presentase 27,21% untuk kategori jawaban "Sangat berperan" dan 90 responden atau presentasenya 61,22% yang menjawab "Cukup berperan. Sedangkan 17 responden atau presentase 11,56% menjawab "Kurang berperan" dan untuk jawaban tidak berperan tak seorang responden yang memberikan penilaian.

Dalam mendukung atau memprakarsai pelaksanaan pembangunan tergambar jelas peran Kepala Desa sebagai mana tabel berikut :

Tabel 21

TANGGAPAN RESPONDEN PENILAIAN TERHADAP KEPALA
DESA MENDUKUNG/MEPERKARSAI PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN.

No.	Mendukung/Meperkerasai Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah	
		F	%
1.	Sangat berperan	45	30,61
2.	Cukup berperan	95	64,65
3.	Kurang berperan	7	4,75
4.	Tidak berperan	-	-
	Jumlah	147	100,

Sumber : Data diolah responden, 1994.

Dari tabel diatas terungkap hasil pengumpulan dari responden yaitu 45 responden atau presentase 30,61% menjawab "Sangat berperan" dan 95 responden atau presentase 64,65% menjawab "Cukup berperan". Dan 7 responden atau presentase 4,75% menjawab "Kurang berperan" serta untuk alternatif jawaban "Tidak berperan" tidak ada responden yang memberi penilaian.

Selanjutnya dalam usaha memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam setiap sektor pembangunan di Desa, memperlihatkan hasilnya dalam tabel berikut :

Tabel 22

TANGGAPAN RESPONDEN PENILAIAN TERHADAP KEPALA
DESA DALAM MEMBERIKAN KESEMPATAN MASYARAKAT UNTUK
BERPARTISIPASI DALAM PEMBANGUNAN.

No.	Memberikan Kesempatan Masyarakat Untuk Berpartisipasi Dalam Pembangunan	Jumlah	
		F	%
1.	Sangat berperan	65	44,21
2.	Cukup berperan	70	47,61
3.	Kurang berperan	12	8,16
4.	Tidak berperan	—	—
	Jumlah	147	100,

Sumber : Data diolah responden, 1994.

Pada tabel diatas, diperoleh tanggapan yaitu 65 responden atau presentase 44,21% memberi jawaban "Sangat berperan" dan 70 responden atau presentase 47,61% untuk jawaban "Cukup berperan". 12 responden atau presentase 8,16% yang menjawab "Kurang berperan" dan untuk alternatif jawaban "Tidak berperan" tidak ditemukan jawaban responden.

Mengenai Kepala Desa dalam mengadakan koordinasi terhadap tujuan pembangunan desa, tergambar jelas pada tabel berikut :

Tabel 23

TANGGAPAN RESPONDEN PENILAIAN TERHADAP KEPALA DESA DALAM MENGADAKAN KOORDINASI DALAM PEMBANGUNAN.

No.	Mengadakan Koordinasi dalam Pembangunan	Jumlah	
		#	%
1.	Sangat berperan	27	18,36
2.	Cukup berperan	57	37,50
3.	Kurang berperan	36	23,60
4.	Tidak berperan	-	-
	Jumlah	147	100,

Sumber : Data diolah responden, 1994.

Berdasarkan tabel diatas terdapat jelas hasil pengumpulan data yaitu 27 responden atau persentase 18,36% menjawab "Sangat berperan" dan 57 responden atau persentase 37,50 untuk jawaban "Cukup berperan". Sedangkan untuk kategori jawaban "Kurang berperan" adalah 36 responden atau persentase 23,60 persen yang memberikan jawaban dan untuk jawaban "Tidak berperan", tidak dicatatkan jawaban dari responden.

Untuk kategori terhadap kepala desa dalam menilai kemampuan mempengaruhi masyarakat guna membangkitkan kemauan untuk berpartisipasi dalam pembangunan terdapat pada tabel berikut :

Tabel 24

**TANGGAPAN RESPONDEN PENILAIAN TERHADAP KEPALA
DESA KEMAMPUANNYA MEMENGARUHI MASYARAKAT BERPARTISIPASI
DALAM PEMBANGUNAN.**

No.	Kemampuan Mempengaruhi Masyarakat Berpartisipasi Dalam Pembangunan	Jumlah	
		f	%
1.	Sangat berperan	25	17,00
2.	Cukup berperan	95	64,27
3.	Kurang berperan	27	18,73
4.	Tidak berperan	0	0
	Jumlah	147	100

Sumber : Data pilihan responden, 1994.

Dari tabel diatas menunjukkan alternatif jawaban yakni 25 responden atau presentase 17,00% memilih jawaban "Sangat berperan" dan 95 responden atau presentase 64,27% memberikan jawaban "Cukup berperan" dan untuk jawaban "Kurang berperan" adalah 27 responden atau presentase 18,15% yang memberikan penilaian sedangkan untuk jawaban tidak berperan tak seorangpun responden memberikan penilaian.

Berdasarkan tabel menunjukkan dengan jelas bahwa kepala desa Libureng telah berperan sebagai motivator dalam pembangunan di desa Libureng. Selanjutnya dapat dikatakan bahwa sesuai dengan penalaran para responden terhadap kepala desa cukup memberi perangsang atau pendorong bagi usaha melaksanakan pembangunan khususnya di desa Libureng. Selain itu realisasi pembangunannya merupakan bentuk-bentuk kemampuan yang patut mendapat perhatian sama dengan posisinya sebagai motivator pembangunan di desa, utamanya di desa Libureng selanjutnya. Hasil-hasil pembangunan dalam berbagai sektor atau segi baik yang berupa fisik maupun nonfisik telah mulai nampak sebagaimana halnya desa-desa lain di Kabupaten Daerah Tingkat II Bone. Kesemuanya itu mungkin dapat dikatakan karena disamping sebagai realisasi dari hasil suatu proses pembangunan itu sendiri, selain itu juga merupakan kewajiban dan tanggung jawab Kepala desa. Sebagai motivator pembangunan dalam hal ini dituntut untuk mendukung atau sebagai pendorong dalam pelaksanaan pembangunan di desanya.

Kepala desa sebagai motivator pembangunan seperti yang telah diungkapkan tersebut diatas, dengan demikian juga secara langsung keterlihatan masyarakat dengan aktif dalam setiap program atau sektor pembangunan sangat besar sekali pengaruhnya. Antara masyarakat dan Kepala desa merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena tanpa masyarakat tersebut, Kepala desa tidak dapat

melaksanakan perannya sebagai motivator pembangunan dengan baik, demikian pula sebaliknya tanpa kepala desa sebagai motivator (pendorong) atau penggerak serta memberikan masukan-masukan terhadap masyarakat hal ini mungkin karena hasil pembangunan yang dicapai akan dinikmati oleh masyarakat sendiri, olehnya kesadaran akan pentingnya pembangunan perlu ditingkatkan dalam kehidupan masyarakat pedesaan..

B. Partisipasi Masyarakat.

Pembangunan yang telah digalakkan oleh pemerintah sekarang pada hakikatnya mencakup segala aspek kehidupan masyarakat dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat hanya dapat dicapai jika upaya pembangunan mendapat dukungan hanya dapat dicapai jika upaya pembangunan dapat dukungan atau partisipasi masyarakat (terciptanya kesetiaan dan kewajiban yang serasi antara kegiatan pemerintah dan masyarakat).

Secara umum partisipasi masyarakat dapat diartikan sebagai keterlibatan atau ikut sertaan seorang atau kelompok masyarakat secara sadar dalam suatu kegiatan-kegiatan tertentu. Partisipasi masyarakat menyangkut persoalan sikap dan perilaku masyarakat baik sebagai subjek maupun sebagai obyek pembangunan. Suatu hal yang konkrit dalam setiap kelompok sosial dalam masyarakat baik dalam wilayah pemerintahan tertentu maupun kelompok lainnya. Keikut sertaan masyarakat dapat kita lakukan

dalam bentuk atau tipe, yaitu membantu partisipasi bersama baik telah terorganisir maupun tipe yang timbul secara spontanitas. Bentuk-bentuk partisipasi dalam kegiatan bersama bentuk koordinasi pemerintah.

Dengan demikian, untuk berlangsungnya suatu proses pembangunan diperlukan syarat kemampuan kelas, serta kemampuan untuk dapat memanfaatkan setiap kesempatan baik keperluan. Masyarakat harus aktif atau berpartisipasi memerahkan masalah-masalah dan memiliki sikap bertalib bagi pikiran-pikiran dan usaha baru. Selain itu dibutuhkan kelompok kreatif atau dinamis, pemimpin yang kreatif serta segalanya yang bertikiran kreatif. Partisipasi atau keikutsertaan kelompok dapat dimulai dari lingkungan keluarga masyarakat yang dapat beranggabah atau prakarsa sebagai sumbangsib terhadap negara dan masyarakat.

Warga masyarakat khususnya masyarakat pedesaan sebagai individu tidak boleh pasrah pada keadaan yang dihadapinya atas dasar pendoman hidup atau segala sesuatu merupakan nasib buruk baginya. Manusia pribadi atau masyarakat atau dapat berkarya dan menambah karya dan tidak selalu terganggu atas wargawarga masyarakat lainnya.

Dalam bentuk atau partisipasi bersama ini masyarakat pedesaan diajak bahkan dianjurkan memberikan sumbangsib atau harta bendanya kepada proyek-proyek pembangunan tertentu yang biasanya dalam bentuk fisik. Selain itu ada

juga bentuk partisipasi individu secara perorangan yang merupakan partisipasi individu atau dalam lingkungan keluarga walaupun demikian sasaran atau tujuan secara individu, akan tetapi memberikan pengaruh secara positif dalam pembangunan, secara umum. Adapun bentuk-bentuk partisipasi yang dimaksudkan adalah ikut serta menabung melalui simpedes program keluarga berencana, menanggung pembiayaan pendidikan anak sekolah, pembangunan rumah penduduk dan lain-lain khususnya di desa Libureng Kecamatan Tonra.

Berdasarkan dengan bentuk-bentuk partisipasi yang telah disebutkan diatas, maka dalam hal ini akan digambarkan bagaimana tingkat partisipasi masyarakat Libureng dalam pembangunan. Hal ini tergambar jelas pada tabel berikut ini :

Tabel 25

**TANGGAPAN RESPONDEN TERHADAP KESEMPATAN DIBERIKAN
UNTUK KEPARTISIPASI DALAM PEMBANGUNAN.**

No.	Partisipasi	Jumlah	
		F	%
1.	Terus menerus	90	61,22
2.	Sering	40	27,21
3.	Kadang-kadang	17	11,56
	Jumlah	147	100,

Sumber : Data olahan responden, 1998.

Dari tabel diatas, menunjukkan tingkat partisipasi

masyarakat dalam pembangunan di desa Libureng adalah diberikannya kesempatan masyarakat secara "terus menerus" sesuai dengan prosentasi penilaian, yaitu 90 responden atau prestase 61,22 % memberikan jawaban secara "terus menerus" dan 40 responden memberikan jawaban "sering" atau presentasinya 27,21 % serta untuk kategori jawaban "kadang-kadang " 17 responden atau presentase 11,56 %. Dengan demikian, adanya korelasi antara tingkat partisipasi masyarakat dan pemerintah dalam hal ini Kepala Desa, sehingga pembangunan pedesaan dapat diharapkan berkembang khususnya di desa Libureng. Jadi dengan demikian, Kepala Desa sebagai pemimpin harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program pembangunan dan hendaknya mampu menjadi pendorong atau motor penggerak terhadap keikut sertaan atau partisipasi masyarakat dalam setiap sektor pembangunan.

C. Faktor yang Berpengaruh.

Dalam melaksanakan pembangunan dipedesaan, sangat perlu juga diperhatikan dari sejumlah aspek sebagai faktor pendukung agar apa yang menjadi tujuan dapat terlaksana dengan baik dan berdaya guna. Sedangkan faktor-faktor yang dimaksudkan dapat ditinjau dari dua segi, yaitu segi pendukung dan segi penghambat dalam suatu proses pembangunan.

Olehnya itu dalam melakukan penelitian dengan

bertanya pada obyek yang diteliti yaitu desa Libureng maka dengan demikian pelaksanaan pembangunan yang dimaksud berdasar pada daerah (wilayah) yang diteliti. Dalam melakukan penelitian tidak terlepas dari penerapan suatu teori, dari itu tidaklah mutlak juga suatu teori akan sesuai dengan apa yang menjadi masalah yang diteliti. Pada penelitian di desa Libureng, masalahnya tidak mutlak teori yang dipergunakan oleh peneliti akan sesuai dengan yang dialami oleh Pemerintah desa karena ini dipengaruhi oleh beberapa hal.

1. Faktor Pendukung.

Berdasarkan pada penjelasan tersebut diatas, selanjutnya juga akan digambarkan dengan jelas jenis-jenis faktor pendukung dan prekwensi yang dimiliki dalam terselenggaranya proses pembangunan di desa Libureng. Faktor pendukung yang dimaksudkan meliputi antara lain, tingkat kesadaran masyarakat, partisipasi masyarakat yang tinggi, ikatan kekeluargaan yang erat, jiwa gotong royong masyarakat yang masih kokoh, dan potensi-potensi demikian desanya serta ditunjang dengan penataan administrasi desa yang lebih baik. Semua itu yang menjadikan desa Libureng dapat memperoleh suatu prestasi tersendiri dalam wilayah Kecamatan Jura Kabupaten Baurah Tingkat II Jawa. Untuk itu pada tabel berikut ini, terlihat macam-macam

faktor pendukung terlaksananya pembangunan di desa Libureng.

Tabel 26

TANGGAPAN RESPONDEN TERHADAP FAKTOR PENDUKUNG DALAM PELAKSANAAN PERANAN KEPALA DESA SEBAGAI MOTIVATOR PEMBANGUNAN

No.	Faktor Pendukung	Jumlah	
		F	%
1.	Tingkat kesadaran masyarakat	50	34,01
2.	Partisipasi masyarakat	35	23,80
3.	Ikatan kekeluargaan yang erat	15	10,20
4.	Jiwa gotong royong yang kokoh	30	20,40
5.	Potensi-potensi daerah (Desa)	10	6,80
6.	Penataan Administrasi yang baik	7	4,76
	Jumlah:	147	100,

Sumber : Data olahan responden, 1994.

Sesuai dengan tabel tersebut diatas, nampak jelas bahwa yang paling dominan dalam memberikan dorongan pada penyelenggaraan peran Kepala Desa sebagai motivator pembangunan adalah tingginya tingkat kesadaran masyarakat yaitu 50 responden atau persentasenya 34,01 % terhadap "partisipasi masyarakat" dan 35 responden atau persentasenya 23,80% adalah "tingkat kesadaran masyarakat". Sedangkan untuk kategori jawaban "ikatan kekeluargaan yang erat" adalah 15 responden 10,20% tingkat persentase jawaban dan 30 responden atau

presetasnya 10,40 terhadap "jiwa gotong royong yang kokoh" selanjutnya 10 responden atau persentasenya 4,00 terhadap kategori jawaban "potensi-potensi daerah atau desa" serta 7 responden atau persentase 4,761 terhadap "penataan administrasi yang baik".

Selain faktor-faktor pendukung sebagaimana telah dikemukakan di atas, masih ada faktor lain yang juga merupakan penunjang keberhasilan Kepala Desa dalam melaksanakan fungsinya sebagai motivator pembangunan, yaitu pendekatan serena kekeluargaan, kerjasama kelompok dan perencanaan.

2. Faktor Penghambat.

Tidak terlaksananya rencana baik suatu desa penyelenggara atau tatanan, pembangunan dan kemasyarakatan walaupun potensi-potensi ada, adalah berarti terdapat adanya suatu faktor penghambat atau kendala tertentu.

Berdasarkan uraian itu, berdasarkan hasil penelitian di desa Libareng, terdapat 2 (dua) faktor yang menjadi kendala dalam proses penyelenggaraan proses kepala desa sebagai motivator pembangunan, yaitu tingkat pendidikan aparat yang masih rendah dan masyarakatnya. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 26

TANGGAPAN RESPONDEN TERHADAP FAKTOR PENGHAMBAT DALAM
PELAKSANAAN PERAN KEPALA DESA SEBAGAI MOTIVATOR
PEMBANGUNAN

No.	Faktor Penghambat	Jumlah	
		F	%
1.	Tingkat pendidikan Apar. 1 yang masih rendah	35	10,60
2.	Perilaku Masyarakat yang masih	62	57,82
	Jumlah	107	100

Sumber : Data olahan responden, 1994.

Pada data tersebut diatas, secara jelas dijabarkan bahwa yang penting merupakan kendala-kendala atau penghambat dalam proses pembangunan, adalah tingkat pendidikan aparat yang masih rendah yaitu 35 responden atau presentase 57,82 % yang memberikan jawaban sedang untuk penilaian terhadap pendidikan masyarakat, yaitu 62 responden atau presentase 42,17%.

Berdasarkan atas kenyataan itu maka secara jelas bahwa rencana penyelenggaraan pembangunan dan partisipasi akan bertumpuh pada hambatan-hambatan. Bila masalah ini kurang mendapat perhatian. Dari itulah sendiri dapat diupayakan untuk mengantisipasi masalah, penduduk aparat dan masyarakat yang lebih maju lagi. Dengan demikian itu, secara pasti pendukung kepada pemerintah desa dalam hal

ini Kepala desa Libureng untuk lebih meningkatkan lagi faktor pendukung dan kalau perlu faktor penghambat/kendala-kendala itu dapat diatasi. Hal ini sangat penting karena masyarakat dasar bagi terselenggaranya pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan baik serta dapat lebih berguna sesuai dengan harapan dan kenyataan pemerintah dan masyarakat pada umumnya.

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian mengenai Kepala Desa sebagai Motivator pembangunan di desa Labunan, Kecamatan Tana, Kabupaten Daerah tingkat II Tana, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa tentang peranan Pemerintah desa dalam hal ini adalah Kepala Desa telah bersedia melaksanakan dalam mengatasi dan memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya, kekuatan sendiri dengan memanfaatkan tenaga dan sumber-sumber kelayaan dan pendapatan di desanya.

Kepala Desa sebagai merupakan pusat kedudukan yang sangat strategis, baik dalam struktur pemerintahan maupun dalam program pelayanan, terutama dalam rangka motivasi pembagian atau daya kata ini sebagai pendorong, juga pendorong masyarakat untuk menandatangani, menandatangani. Dalam pesannya sebagai pendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam setiap sektor pembangunan Kepala desa dianggap cukup berperan "sebagaimana apa yang diharapkan" selama ini. Pesan Kepala desa sebagai motivator pembangunan dengan demikian pemerintah desa atau Kepala desa telah memberikan manfaat yang sangat besar terhadap perkembangan di desa Labunan.

Selanjutnya peranan Kepala Desa sebagai motivator pembangunan, akan peran serta atau keterlibatan masyarakat

pedesaan merupakan modal besar bagi pembangunan, sebab mereka mempunyai nilai yang universal seperti gotong royong, fungsi sosial, penyelesaian konflik dalam pemerintah. Hal ini penting karena pelaksanaan pembangunan desa yang berpengaruh pada upaya upaya mendayakan masyarakatnya. Pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah membawa masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan desa pedesaan. Dukungan masyarakat akan membawa program pembangunan terhadap pembangunan pedesaan yang pelaksanaan olehnya itu sangat mutlak diperlukan sebagai yang mempunyai program kuat terhadap masyarakat pedesaan, yang menjadi pilar terselenggaranya program pembangunan dipedesaan. Hal ini di desa Libureng di

Dalam pelaksanaan pembangunan di desa juga dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor pendidikan dalam penyelenggaraan pembangunan, Kepala desa didukung oleh tingkat kesadaran masyarakat yang tinggi, partisipasi masyarakat, Ikatan keluarga yang sifat gotong royong potensi desa dan pemantapan administrasi desa. Sedangkan sebagai penghambat adalah masih terdapatnya tingkat pendidikan aparat yang rendah serta rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. faktor penghambat lain walaupun telah diusahakan secara dini namun belum sepenuhnya ang sebagaimana diharapkan karena masih terbetukanya

beberapa kendala-kendala yang ada di desa Libureng tersebut.

B. Saran-Saran

- Agar dapat memperlancar pelaksanaan administrasi Pemerintahan desa dalam rangka mengisi pembangunan di pedesaan khususnya di desa Libureng sangat diharapkan peran serta Kepala desa selaku initiator pembangunan dan menggali masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, dapat lebih dikembangkan lagi agar apa yang menjadi tujuan pembangunan dapat tercapai sebagai mana yang diharapkan.
- Untuk mengatasi kendala-kendala dalam proses pembangunan di desa Libureng, pada saat sekiranya masalah-masalah tersebut dapat diantisipasi seperti masalah tenaga dan sarana hagi aparat dan masyarakat melalui pelatihan dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU TEORI

- Aryaningrat, H. (ed.). 1977. Struktur dan Fungsi Masyarakat Desa. Surabaya: Usaha Nasional.
- Balagang, H. (ed.). 1973. Masyarakat Desa dan Pembangunan. Denpasar, Bali: Balai Pustaka Indonesia.
- Balagang, H. 1978. Perencanaan Sosial dan Pembangunan. Kenya.
- Bowman, S. T. 1971. Sosialisme Baru. Jakarta: Yayasan Keadilan.
- Faisal, Samudra. 1981. Manajemen Pembangunan Desa. Surabaya: Usaha Nasional.
- Handayani, R. (ed.). 1985. Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen. Jakarta: Gunung Agung.
- , 1988. Landasan dan Pedoman Kerja Administrasi Pemerintahan Daerah Kota dan Desa. Jakarta: Masagung.
- Kartasaputra, G. (ed.). 1987. Desa dan Daerah dengan Tata Pemerintahannya. Jakarta: PT Rineka Cendekia.
- Kansil, C. S. T. 1985. Sistem Pemerintahan Indonesia. Jakarta: Aksara Baru.
- Koentjoringrat, 1981. Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan. Jakarta: Gramedia.
- , (ed). 1982. Masalah-masalah Pembangunan (Bunga Rampai Antropologi Terapan). Jakarta: LP3ES.
- Mansyur, M. Cholil, 1980. Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah. Surabaya: Usaha Nasional.
- Musaneif, 1985. Sistem Pemerintahan Indonesia. Jakarta: Gunung Agung.
- Prasadja, Buddy, 1982. Pembangunan Desa dan Masalah Kepemimpinannya. Jakarta: Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial (YIIS).

Saparin, Sumber. Ny. 1972. Nata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa, Jogjakarta : Fakultas Sospol. UGM.

Siagian, Sondang. 1988 Administrasi Pembangunan, Jakarta : CV. Masagung.

_____, 1983. Filsafat Administrasi, Jakarta : Gunung Agung.

Soekanto, Soerjono. 1986. Kedudukan Kepala Desa Sebagai Hakim Perdamaian, Jakarta : CV. Rajawali.

_____, 1985 Sociologi Suatu Pengantar, Jakarta : Rajawali.

R. BUKU METODE PENELITIAN

Faisal, Sanafiah. 1989. Format-format penelitian Sosial, Dasar-dasar dan Aplikasi, Jakarta : Rajawali Pers.

Ladeng, Mustam, et. al. 1991. Pedoman Menusun Skripsi, Ujung Pandang : Fakultas Isipol Universitas "45".

Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofian. 1986. Metode Penelitian Survey, Jakarta : LPJES.

C. LAIN-LAIN

Anonim. 1973/1974. Ilmu Sosial dan Budaya Dasar, Ujung Pandang. Proyek Diklat Ilmu Sosial dan Budaya Dasar.

_____, 1988. Ketetapan DPR RI Tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), Surabaya : Amin.

_____, 1977 Undang-undang Republik Indonesia No.5 Tentang Pemerintahan Desa, Surabaya : Usaha Nasional.